



# WiRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

MEMBANGUN KESADARAN  
MASYARAKAT MARITIM  
DALAM PERSPEKTIF  
BELA NEGARA



MEMBANGUN KOMPONEN  
PENDUKUNG  
MELALUI SINERGISAS  
STAKEHOLDER

ANALISIS KEBUTUHAN  
KAPAL RUMAH SAKIT  
TNI DALAM OPERASI  
MILITER SELAIN PERANG  
PENANGGULANGAN  
BENCANA ALAM

PARTISIPASI  
PUSREHAB KEMHAN  
DI INDONESIA 2018  
ASIAN PARA GAMES



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



Kemhan RI



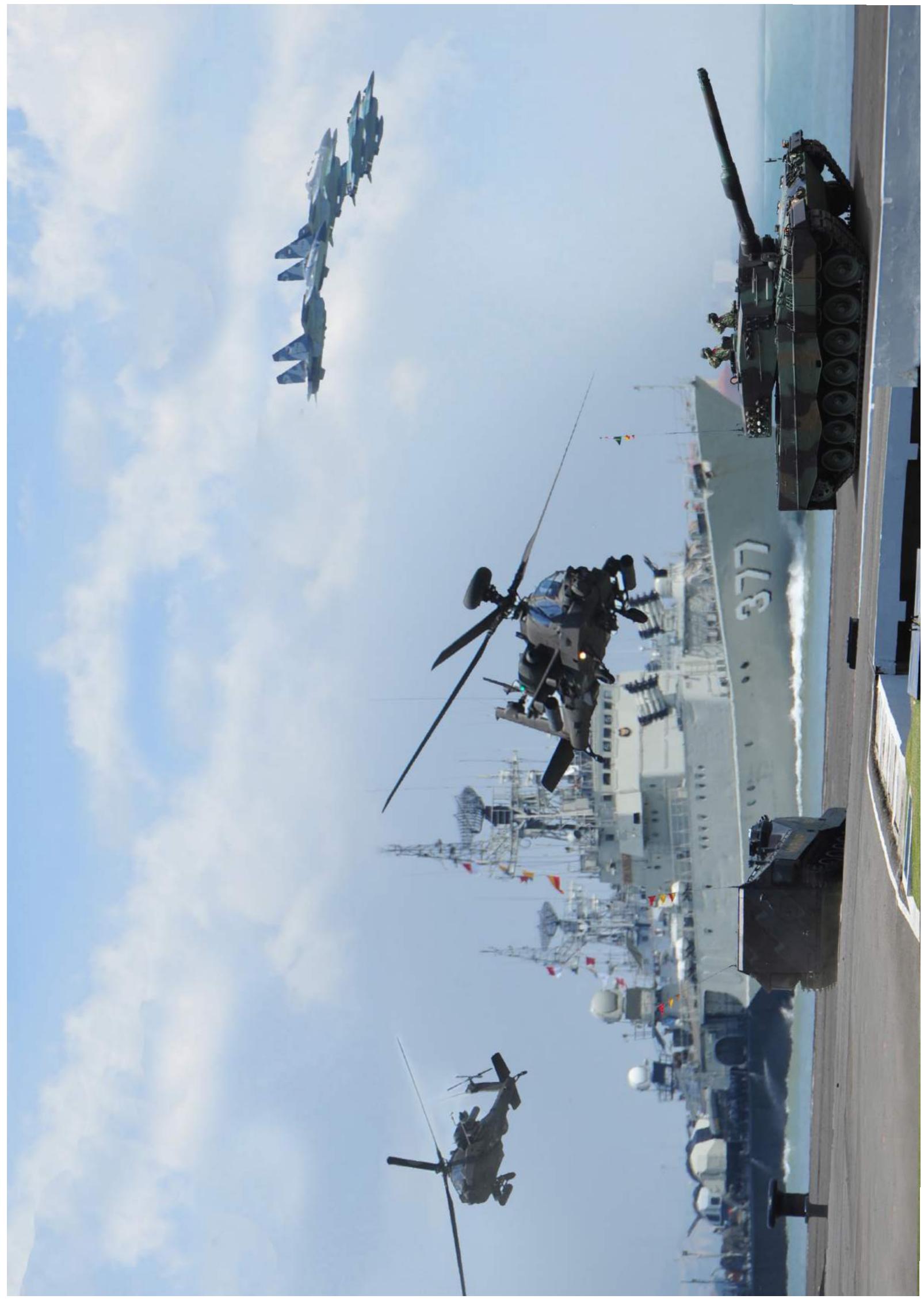
Kemhanri



kemhan RI

ISBN 1693-0231





## DEWAN REDAKSI

### Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan  
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Marsdyia TNI Hadiyan Sumintaatmadja

### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos.

### Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### Redaksi:

M. Adi Wibowo , M.Si.  
Kapten Cku Lindu Baliyanto

### Desain Grafis:

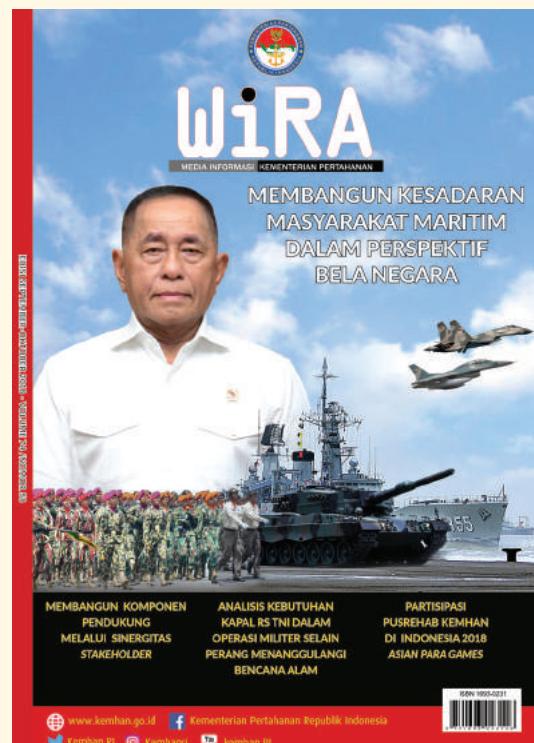
Imam Rosyadi  
Mandiri Triyadi, S.Sos.

### Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

### Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.



Diterbitkan oleh:

Puskom Publik Kemhan  
Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta  
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

## Serambi Redaksi



Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA Edisi kelima bulan September-Oktober 2018. Tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan diantaranya: Membangun Kesadaran Masyarakat Maritim dalam Perspektif Bela Negara; Membangun Komponen Pendukung melalui Sinergitas Stakeholder; Analisis Kebutuhan Kapal RS TNI dalam Operasi Militer Selain Perang Penanggulangan Bencana Alam; Partisipasi Pusrehab Kemhan di Indonesia 2018 Asian Para Games; serta beberapa Berita Pertahanan .

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

# Daftar Isi

## ARTIKEL

6

### MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT MARITIM DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA

Menjadi sangat penting untuk membina dan memberdayakan sikap dan jati diri yang tangguh masyarakat maritim sebagai salah satu bentuk perwujudan bela negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup NKRI menuju poros maritim dunia.

12

### MEMBANGUN KOMPONEN PENDUKUNG MELALUI SINERGISASI STAKEHOLDER

Sumber daya nasional yang berada di dalam dan atau di luar pengelolaan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga, swasta dan pemerintah daerah selaku stakeholder / pemangku kepentingan.

19

### ANALISIS KEBUTUHAN KAPAL RS TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Keberadaan rumah sakit bergerak sangat diperlukan pada saat kondisi kegawatdaruratan. Rumah sakit bergerak dapat berupa rumah sakit lapangan, kapal rumah sakit, atau pesawat rumah sakit yang dimiliki oleh unsur kesehatan dari Tentara Nasional Indonesia (organisasi militer).

25

### PARTISIPASI PUSREHAB KEMHAN DI INDONESIA 2018 ASIAN PARA GAMES

*Indonesia 2018 Asian Para Games (INAPG 2018)* adalah ajang olahraga khusus atlet penyandang disabilitas pertama tingkat Asia yang diselenggarakan di Indonesia.



## BERITA PERTAHANAN

29 KEMHAN / TNI AJUKAN PERMOHONAN KENAIKAN ANGGARAN DALAM RAKER DENGAN KOMISI I DPR RI

30 MENHAN HADIRI UPACARA HUT KE-73 TNI DI MABES TNI

31 LOMBA PCTA LAHIRKAN 4080 KADER BELA NEGARA TERBAIK DARI 34 PROVINSI DI INDONESIA

33 MENHAN RI MENJADI PEMBICARA DALAM ACARA DISKUSI MEDIA FORUM MERDEKA BARAT 9

35 FOTO KEGIATAN MENHAN RI

# MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT MARITIM DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA

Oleh:

Laksma TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum

Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan

## Pendahuluan

Dalam rangka menyongsong era globalisasi, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai macam dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal ini akan berdampak pada kualitas bangsa Indonesia dalam memperkuat pertahanan maupun keamanan negara. Bela Negara hadir ditengah - tengah masyarakat yang memberikan

panduan serta contoh sikap dan perilaku guna memperkokoh rasa persaudaraan, menciptakan keteraturan, menjaga keutuhan wilayah yang direalisasikan dalam rangka memperjuangkan keselamatan bangsa dan pertahanan negara. Universitas Pertahanan (2016) menyatakan bahwa bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dapat dikatakan bahwa bela negara menitikberatkan pada proses perubahan sikap dan perilaku bangsa Indonesia menuju arah jiwa-jiwa kepribadian nasionalisme dan patriotisme dalam menjamin tetap berjayanya NKRI.



Salah satu bentuk kejayaan Bangsa dan Negara Indonesia adalah luas dan berlimpahnya sumber daya maritim yang bisa dimanfaatkan masyarakat banyak, khususnya daerah pesisir. Program "Nawacita" yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo juga menitikberatkan pada bangkit dan kokohnya jati diri Indonesia sebagai Negara Maritim. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk membina dan memberdayakan sikap dan jati diri yang tangguh masyarakat maritim sebagai salah satu bentuk perwujudan bela negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup NKRI menuju poros maritim dunia.

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan lautan yang luas

tentunya memerlukan panggilan dari setiap warganya dalam menjaga dan memelihara kondisi kepulauan dan sumber daya di laut. Tugas terkait penjagaan serta pengamanan perairan maupun pulau-pulau terdepan bukan hanya menjadi kewajiban TNI dan pihak keamanan lainnya saja, melainkan menjadi tanggung jawab mutlak bagi masyarakat secara luas. Hal ini tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Oleh karena itu, bela negara dalam rangka memberdayakan masyarakat maritim di Indonesia juga patut mendapatkan perhatian

lebih. Ancaman-ancaman yang datang dari luar bisa saja menguji ketuhanan bangsa dan negara sehingga pemberdayaan masyarakat maritim sangat mendesak untuk dilaksanakan guna membangun kesadaran bela negara dalam rangka menangkal segala bentuk ancaman dari pihak luar.

### Pembahasan

#### a. Budaya dan Karakter Masyarakat Maritim

Bangsa asing yang merantau akan menyebut tanah kelahirannya dengan sebutan *homeland* atau *motherland* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih tepat dimaknai dengan bumi pertiwi atau ibu pertiwi. Istilah ini mungkin berasal dari pemujaan kepada Dewi Kesuburan yang sifatnya *universal*. Meski nenek moyang bangsa Indonesia juga mengenal pemujaan kepada Dewi Kesuburan, untuk menyebut tanah kelahirannya akan lebih tepat dengan istilah "tanah air" mengingat bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa menempati pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan luas.

Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ciri khas atas keanekaragaman suku, bahasa, dan budayanya. Secara fisik antar satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh laut. Akan tetapi, pemisahan itu tidak bisa dilihat dari segi kemaritim karena seluruh perairan yang ada di Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah.

Di negara yang disebut Indonesia berdiam sebuah bangsa besar yang mendiami wilayah dan negara kepulauan, bangsa yang multikultur





Sumber : Okilukitoblogspot.wordpress.com

yang di dalamnya ada dua kelompok kehidupan, yaitu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman. Secara sadar atau tidak, kedua kelompok masyarakat ini hidup dalam sebuah ketergantungan akan laut. Semuanya itu kembali pada konsep hidup dan kesadaran ruang hidup yang berasal dari heterogenitas tadi. Kemudian dalam sejarahnya, juga tercatat antagonis hasrat untuk saling mengendalikan dari kedua kelompok besar itu sendiri. Kelompok yang tinggal di darat berusaha untuk mengendalikan pesisir dengan segala upaya untuk mendapatkan hasil dari laut, dan juga sebaliknya. (Utomo, B.B., 2017)

Masyarakat maritim pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resource based*),

seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, berikut adalah sifat dan karakteristik masyarakat maritim:

1. Sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan. Contohnya seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengelolaan hasil perikanan yang memang dominan dilakukan.
2. Sangat di pengaruhi oleh faktor lingkungan, musim dan juga pasar.
3. Struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama. Hal ini cenderung membuat taraf pendidikan maupun kesejahteraan masih berada pada tingkatan yang cukup rendah.
4. Sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai Nelayan. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang

mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan, khususnya di wilayah laut.

#### b. Masyarakat Maritim dan Pertahanan Negara

Buku Putih Pertahanan Negara menjabarkan bahwa pertahanan negara Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta guna mencapai tujuan nasional. Pertahanan negara yang bersifat semesta ini pada hakikatnya adalah suatu bentuk pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan fungsi dan peran nya masing-masing. (Kemhan, 2015). Sistem pertahanan semesta itu sendiri mengombinasikan pertahanan militer serta pertahanan nirliliter melalui usaha membangun kekuatan pertahanan negara yang kuat dan disegani. Hal tersebut dipersiapkan secara dini dengan harapan dapat bekerja secara berkelanjutan dalam menghadapi

berbagai jenis ancaman. Oleh karena itu, masyarakat maritim tentunya memiliki peran dalam upaya pertahanan negara.

Konsep masyarakat maritim yang aktual merujuk pada kesatuan-kesatuan sosial yang sepenuhnya atau sebagian besar menggantungkan kehidupan sosial ekonominya secara langsung atau tidak langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan jasa-jasa laut. Mereka terdiri dari kesatuan-kesatuan kelompok kerja seperti komunitas nelayan dan pelayar, Angkatan Laut dan Satgas Keamanan laut, pekerja tambang, pedagang dan pengusaha industri hasil laut, dan kawasan industri pariwisata. Mereka memiliki fungsi masing-masing yang dimulai pada tatanan pemanfaatan sumber daya laut, pengamanan, penjagaan maupun pada sektor peningkatan pariwisata. (Maynar, S., 2017)

bukan hanya kelompok tersebut dianggap sebagai masyarakat pewaris dan pendukung kebudayaan maritim di Indonesia, tapi tidak terkecuali bagi semua komunitas pesisir dan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke yang telah menggagas dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi berkaitan sumber daya dan jasa-jasa laut di sekitarnya. Namun demikian, ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka (*open access*). Dengan karakteristik *open access* tersebut, kepemilikan tidak diatur, setiap orang bebas memanfaatkan sehingga dalam pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya sering menimbulkan konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta peluang terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas lebih besar karena terbatasnya pengaturan pengelolaan sumberdaya.

Sejak beberapa dekade terakhir,





Dengan demikian, dalam rangka mengurangi gesekan-gesekan yang ada, penting untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat maritim dalam kehidupan dan aktifitasnya sehari hari. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya pembangunan dan pelestarian sumber daya di perairan, khususnya eksistensi pulau-pulau terdepan yang dihuni masyarakat maritim. Pengembangan kawasan terdepan sangat terbantu oleh sikap masyarakat maritim yang hidup di wilayah perbatasan dengan negara lain guna menjaga kutuhan wilayah NKRI. Dengan adanya optimalisasi dan pemberdayaan masyarakat maritim, maka dukungan pertahanan dan keamanan negara dapat terjamin yang ditandai dengan aktivitas oleh masyarakat maritim Indonesia sebagai wujud dari pertahanan semesta.

c. Bela Negara dan Pemberdayaan Masyarakat Maritim

Spektrum bela negara itu sangat luas, hal ini dimulai dari hubungan

baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang-undang. Diantaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, hal ini menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, termasuk didalamnya unsur penting bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.(Gantina, C., 2017).

Laut sendiri merupakan ajang dalam pencarian kehidupan bagi masyarakat maritim. Pada mulanya masyarakat bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup, namun pada akhirnya mereka juga bertujuan mengembangkan kesejahteraan, atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kekayaan dari kegiatan kemaritiman dalam rangka mencapai tujuan nasional. Laut menjadi media pemersatu bangsa karena melalui laut banyak orang dari berbagai bangsa melakukan interaksi dengan bermacam-macam aktivitas. Melalui laut orang dari berbagai bangsa menjalankan aktivitas perekonomian melalui "jasa" pelayaran antar benua atau antar pulau. Tentunya, hal-hal yang terkait dengan kemajuan dunia maritim tersebut patut untuk diberdayakan.

Dalam masyarakat maritim, termasuk di Indonesia, telah tumbuh berbagai sektor dan subsektor ekonomi kemaritiman baru yang memunculkan segmen-semen atau kategori-kategori

sosial seperti petambang, pekerja industri, pengelola dan karyawan wisata, marinir, akademisi/peneliti, birokrat, dan lain-lain. Tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi dan jasa dengan segmen-segmen masyarakat maritim tersebut memerlukan dan diikuti dengan perkembangan dan perubahan-perubahan kelembagaannya menjadi wadah dan regulasinya. Bentuk nyata pemberdayaan lainnya adalah dengan memotorisasi perahu nelayan dalam rangka pengembangan usaha yang didukung dengan teknologi perikanan laut yang mumpuni diiringi dengan membangun SDM masyarakat maritim itu sendiri. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada masyarakat maritim dalam mengekplorasi sumber daya laut yang ada serta mengurangi risiko konflik antar nelayan maupun taraf ekonomi yang lemah. Pemberdayaan itu sendiri berarti menciptakan peluang bagi masyarakat maritim untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen

dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.(Jamil, M., 2015).

Dengan demikian, semangat bela negara yang diintegrasikan dengan bentuk pemberdayaan masyarakat maritim pada setiap lapisan masyarakat akan menjamin keutuhan bangsa dan negara Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya NKRI serta eksistensi Indonesia di kancah internasional.

### **Penutup**

Sebagai kesimpulan, semangat menggaungkan dan kesadaran bahwa Indonesia adalah Bangsa Maritim juga perlu untuk terus diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan kegiatan-kegiatan nyata seluruh warga negara. Cukup disayangkan jika pada level pelaksanaan di lapangan dan pada tataran masyarakat kebanyakan, masih ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai bangsa maritim. Dukungan konsep bela negara dapat diartikan secara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk

mempertahankan negara dengan carameningkatkan rasa nasionalisme yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara khususnya dalam mewujudkan "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". Guna terwujudnya pertahanan semesta, maka sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, layaknya pertahanan semesta, masyarakat maritim juga harus direalisasikan pada diri seluruh masyarakat Indonesia karena bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim yang mendunia. \*\*\*



## MEMBANGUN KOMPONEN PENDUKUNG MELALUI SINERGITAS STAKEHOLDER

Oleh:

Tri Rahayu Irianingsih, SH.MH

Analis Pertahanan Negara Madya Ditkomduk Ditjen Pothan Kemhan

### Pendahuluan

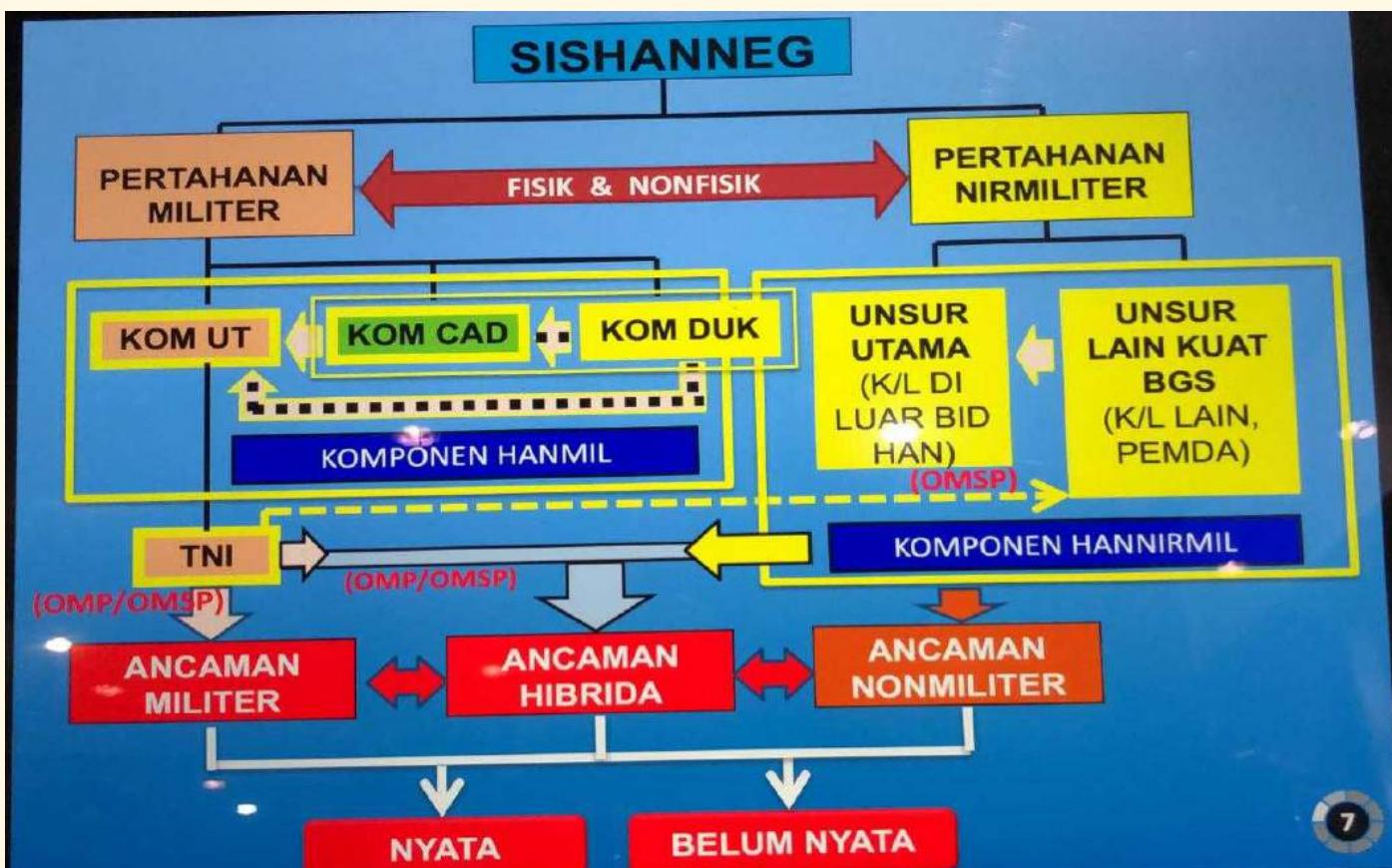
**K**omponen pendukung sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Sumber Daya Nasional terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam,

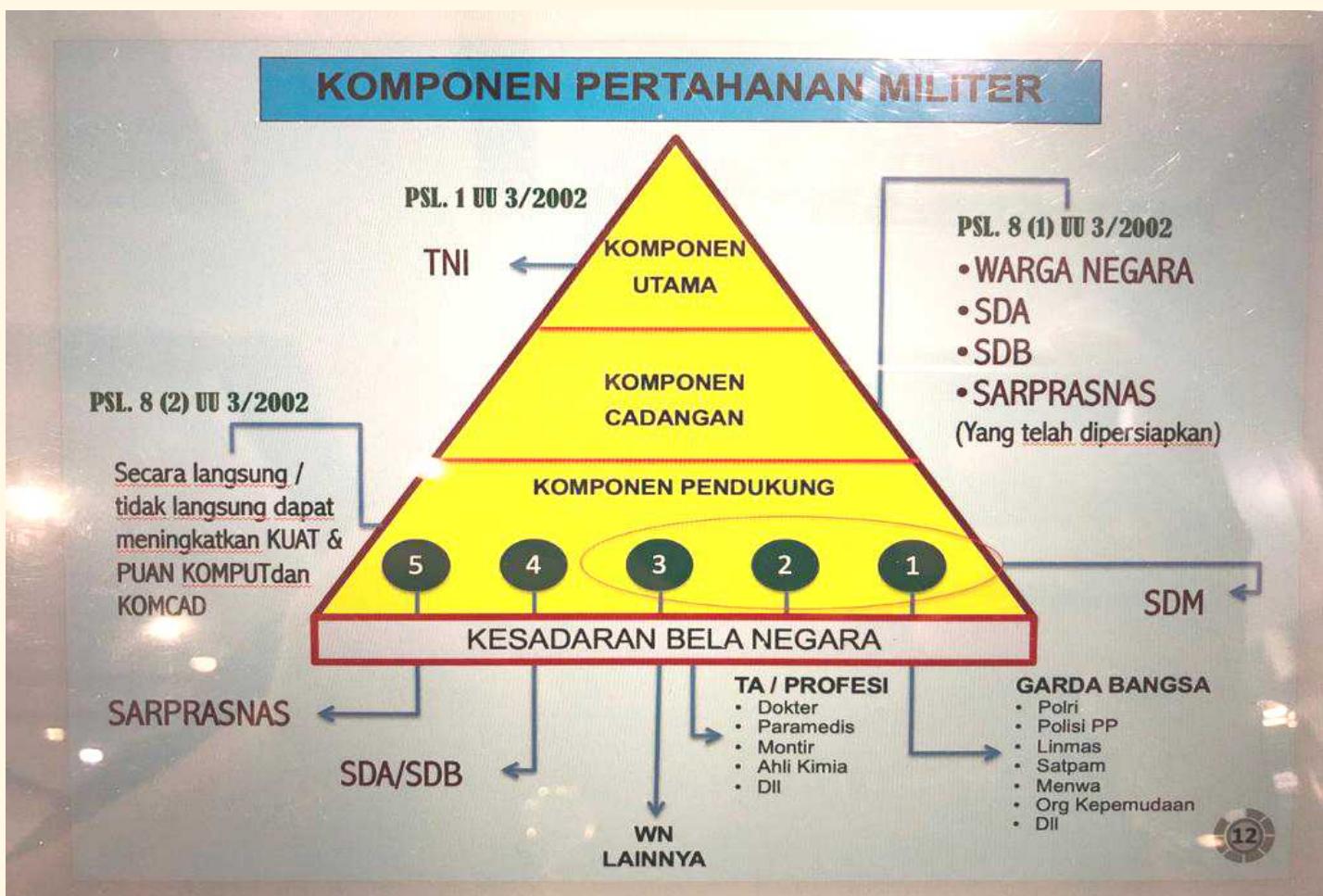
sumber daya buatan dan sarana prasarana.

Pelibatan sumber daya nasional dalam sistem pertahanan bersifat semesta memiliki arti melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan

kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, salah satunya dengan membangun Komponen Pendukung untuk kekuatan pertahanan negara .

Permasalahan utama dalam membangun komponen pendukung adalah belum adanya payung hukum yang berupa undang-undang tentang komponen





pendukung. Tujuan tulisan ini akan lebih difokuskan bagaimana cara mensinergikan para stakeholder untuk membangun Komponen Pendukung sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 karena sejak diundangkan sampai sekarang sudah 16 tahun berjalan, undang-undang tentang komponen pendukung belum dapat diwujudkan.

Apabila hal ini dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara maka masih ada celah untuk kita merintis pembangunan komponen pendukung. Salah satu ketentuan dalam Perpres menyebutkan dimungkinkannya Kementerian Pertahanan dan Instansi terkait

dapat mengadakan kerjasama lintas sektoral yang bersifat *ad hoc* guna menjembatani berbagai kepentingan sambil menunggu peraturan perundang-undangan yang terkait.

Maka transformasi sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan Negara, yang berada di dalam dan atau di luar pengelolaan kementerian yang membidangi pertahanan harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun kekuatan komponen pertahanan negara diantaranya komponen pendukung.

Atas dasar kebijakan tersebut maka sumber daya nasional yang akan dibangun sebagai komponen

pendukung perlu disinergikan, diintegrasikan, dan diarahkan terutama kepada stakeholder / pemangku kepentingan sumber daya terkait agar pembangunan komponen pendukung dapat segera terealisasi sesuai arah kebijakan dan sasaran strategis pertahanan negara.

### Analisis

Sumber daya nasional yang berada di dalam dan atau di luar pengelolaan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga, swasta dan pemerintah daerah selaku stakeholder / pemangku kepentingan, yang secara bersama-sama membangun Komponen

Pendukung. Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan, yang terdiri dari :

1. Sumber daya manusia yang berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 bahwa jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.
2. Sumber daya alam yang terdiri dari:
  - a. Sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti: hutan, tanah ,air, hewan,

hasil perkebunan, hasil perikanan dan lain sebagainya.

- b. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti: barang tambang (minyak bumi, batu bara, gas alam, barang tambang mineral dan barang tambang non mineral).
3. Sumber daya buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan/atau kemampuan daya dukungnya, antara lain hutan buatan, waduk, dan jenis unggul, yang dalam pemanfaatan dan pengelolaannya dapat menunjang tingkat perkembangan wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Sasaran pendayagunaan potensi sumber daya buatan digunakan untuk Industri Pangan, Industri Energi, Industri Air, Industri Obat, Industri Bahan Baku, Industri Alutsista dan Pembangunan Infrastruktur.
4. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional, seperti: mobil, motor, kereta api, kapal, pesawat terbang, bandara, stasiun, terminal, jalan, jembatan, dermaga/galangan dan lain sebagainya.





Sumber: pxhere.com

Sumber daya nasional untuk komponen pendukung dipersiapkan oleh pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan maka perlu dilakukan kegiatan penataan dan pembinaan. Hal ini dilaksanakan agar dapat dimanfaatkan di masa damai untuk kepentingan kesejahteraan dan di masa perang untuk kepentingan pertahanan. Ruang lingkup kegiatan penataan dan pembinaannya adalah sebagai berikut :

Pertama, Proses penataan dan penetapan Komponen Pendukung, meliputi kegiatan penyiapan dan penetapan sumber daya nasional yang terdiri dari pendataan, pemilihan, pemilihan, verifikasi dan

sertifikasi terhadap seluruh sumber daya nasional yang ada.

Sehubungan dengan proses penataan, kementerian/lembaga, swasta dan pemerintah daerah selaku *stakeholder* / pemangku kepentingan berperan untuk memberikan data-data sumber daya nasional sumber daya nasional yang dimilikinya. Adapun sumber daya nasional ini, terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional baik menurut sifatnya (kualitatif atau kuantitatif), sumbernya (internal atau eksternal), cara perolehannya (primer atau sekunder) maupun menurut waktu pengumpulannya (cross section atau berkala) kepada Kementerian Pertahanan atau Panglima TNI. Pengumpulan data tersebut akan bermanfaat sebagai dasar utama untuk menyajikan

keakuratan dan kerelevan data, untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data yang ada di lapangan, dan untuk menyusun sebuah format yang standar.

Oleh karena itu seluruh data yang diperoleh dari kementerian/lembaga, swasta dan pemerintah daerah selaku *stakeholder* / pemangku kepentingan, akan dapat mendukung terbangunnya komponen pendukung dalam rangka mendukung operasional tempur matra darat, matra laut dan matra udara di masa perang. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat diantara Kementerian/Lembaga terkait, Swasta dan Pemda dalam wujud Kesepakatan Bersama (KB) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk penetapan sumber daya nasional kepentingan pertahanan negara.

Pengelolaan sumber daya nasional sebagaimana tersebut di atas, dikelompokkan sesuai kebutuhan Komponen Utama dan Komponen Cadangan menjadi ke dalam segmen-segmen Komponen Pendukung yang ditata menurut kompetensi, produk/jasa dan karakteristiknya, yaitu terdiri dari: 1) Sumber Daya Manusia (Kesamaptaan, jiwa korsa, intelektualitas, profesionalisme dan semangat nasionalisme) ditata menjadi segmen Garda Bangsa, Tenaga Ahli/Profesi dan Warga Negara lainnya; 2) untuk Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan ditata sebagai Logistik Wilayah dan Cadangan Materiil Strategis; serta 3) Sarana dan Prasarana Nasional ditata untuk menunjang kepentingan pertahanan Industri Nasional.

Selanjutnya setelah proses penataan selesai dilaksanakan, maka akan dilakukan penetapan

sumber daya nasional untuk menjadi komponen pendukung melalui:

- a. Verifikasi, yaitu mengkonfirmasi terhadap kapabilitas dan kompetensi serta kapasitas segmen-segmen dengan teknik yang dapat memastikan lokasi/alamatnya. Dalam verifikasi harus sudah dilakukan pelembagaan sebagai wadah yaitu terbentuknya lembaga koordinasi yang dapat mempertemukan unsur fungsi pertahanan yang membidangi komponen pendukung dengan pengelola segmen-segmen yang diverifikasi.
- b. Pemeranan, yaitu kegiatan internalisasi peran dan fungsi segmen-segmen Komponen Pendukung bahwa pemilihan yang dilakukan telah sesuai dengan kriteria dan wujud dukungan yang diperlukan untuk Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Kegiatan pemeranan dilakukan melalui sosialisasi, gladi posko dan simulasi.
- c. Sertifikasi, yaitu ujung dari kegiatan penetapan yang bersifat administratif pengesahan peran dan fungsi segmen-segmen Komponen Pendukung. Dalam sertifikasi ditetapkan kompetensi, kapabilitas, kapasitas dan peran baik segmen Komponen Pendukung yang bersifat lokal maupun nasional dalam mendukung Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

Kedua, Pembinaan Komponen Pendukung adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian,





pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian dari proses pembangunan Komponen Pendukung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ada 2 aspek pembinaan Komponen Pendukung yaitu:

a. Aspek Profesi.

Pembinaan aspek fungsi profesi dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Dinas/Badan di daerah serta lembaga profesi yang menaunginya sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Pembinaan dilakukan melalui latihan dasar dan latihan berkelanjutan di bidang profesiya.

b. Aspek Peran

Sejalan dengan aspek profesi bahwa tiap-tiap segmen

disupervisi perannya sebagai komponen pendukung pada saat mobilisasi sesuai dengan sertifikasinya. Supervisi dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Pertama, secara langsung yaitu dengan melibatkan unsur dan fungsi pertahanan. Contohnya: 1) jika akselerasi kemampuan maka segmennya tenaga ahli/profesi; 2) jika akserasi produksi/jasa maka segmennya industri nasional; 3) simulasi Kamtibmas dan bencana jika yang disupervisi Garda bangsa; 4) produksi dan kemampuan dukungan jika yang disupervisi SDAB/Sarprasnas, dan 5) kesigapan jika segmennya warga Negara lainnya.

Kedua, secara tidak langsung yaitu dengan memberikan petunjuk teknis yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Dinas/

Badan di daerah serta lembaga profesi yang menaunginya berupa sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, gladi posko dan gladi lapangan. Untuk Bimbingan Teknis dilakukan melalui Training Of Trainer (TOT).

Berdasarkan kebijakan umum tentang penyelenggaraan pertahanan negara maka Menteri Pertahanan bekerjasama dengan pimpinan kementerian dan instansi pemerintah lainnya untuk menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Penggunaan Komponen Pendukung di masa perang sesuai segmentasi dan wujud dukungannya untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan maka sumber daya

nasional yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah di masa damai dapat diimplementasikan dalam masa perang. Tindakan pengerahan sumber daya nasional untuk penggunaan komponen pendukung dilandasi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Dengan demikian membangun Komponen Pendukung adalah penting, sebagai bagian integral Sistem Pertahanan bersifat Semesta.

### Kesimpulan

1. Bahwa membangun Komponen Pendukung sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 perlu melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan untuk mendapatkan data sumber daya nasional yang akurat dan relevan sebagai dasar menyusun format yang standar dalam rangka mendukung operasional tempur matra darat, matra laut dan matra

udara di masa perang. Oleh karena itu yang perlu dilakukan Kemhan adalah bersinergi dan bekerjasama dengan stakeholder terkait (kementerian/lembaga, swasta dan pemerintah daerah).

2. Perlu membangun komitmen yang kuat dengan Kementerian/Lembaga terkait, swasta dan Pemda yang diwujudkan kedalam pengaturan yang lebih mengikat yaitu Kesepakatan Bersama (KB) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai landasan terbangunnya komponen pendukung yang dilakukan secara bersama dalam hal pendataan, pemilahan, pemilihan, verifikasi dan sertifikasi terhadap seluruh sumber daya nasional termasuk kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian dari proses pembangunan Komponen Pendukung.

### Rekomendasi

Untuk mendapatkan data sumber daya nasional komponen pendukung, Kemhan perlu membangun kerjasama yang kuat dengan kementerian/lembaga, swasta dan pemerintah daerah selaku stakeholder/pemangku kepentingan melalui pengaturan yang lebih mengikat yaitu Kesepakatan Bersama (KB) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai landasan terbangunnya komponen pendukung yang dilakukan secara bersama.\*\*\*

### Daftar Pustaka

1. Majalah Internal Potensi Pertahanan edisi VI Maret 2014. XX hal. 79
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.



# ANALISIS KEBUTUHAN KAPAL RUMAH SAKIT TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Oleh:

Letkol Kav. Darwin Saputra, S.I.P., M.Han.

Kasubbag Evlap Bag Proglap Setbaranahan Kemhan RI

## Latar Belakang

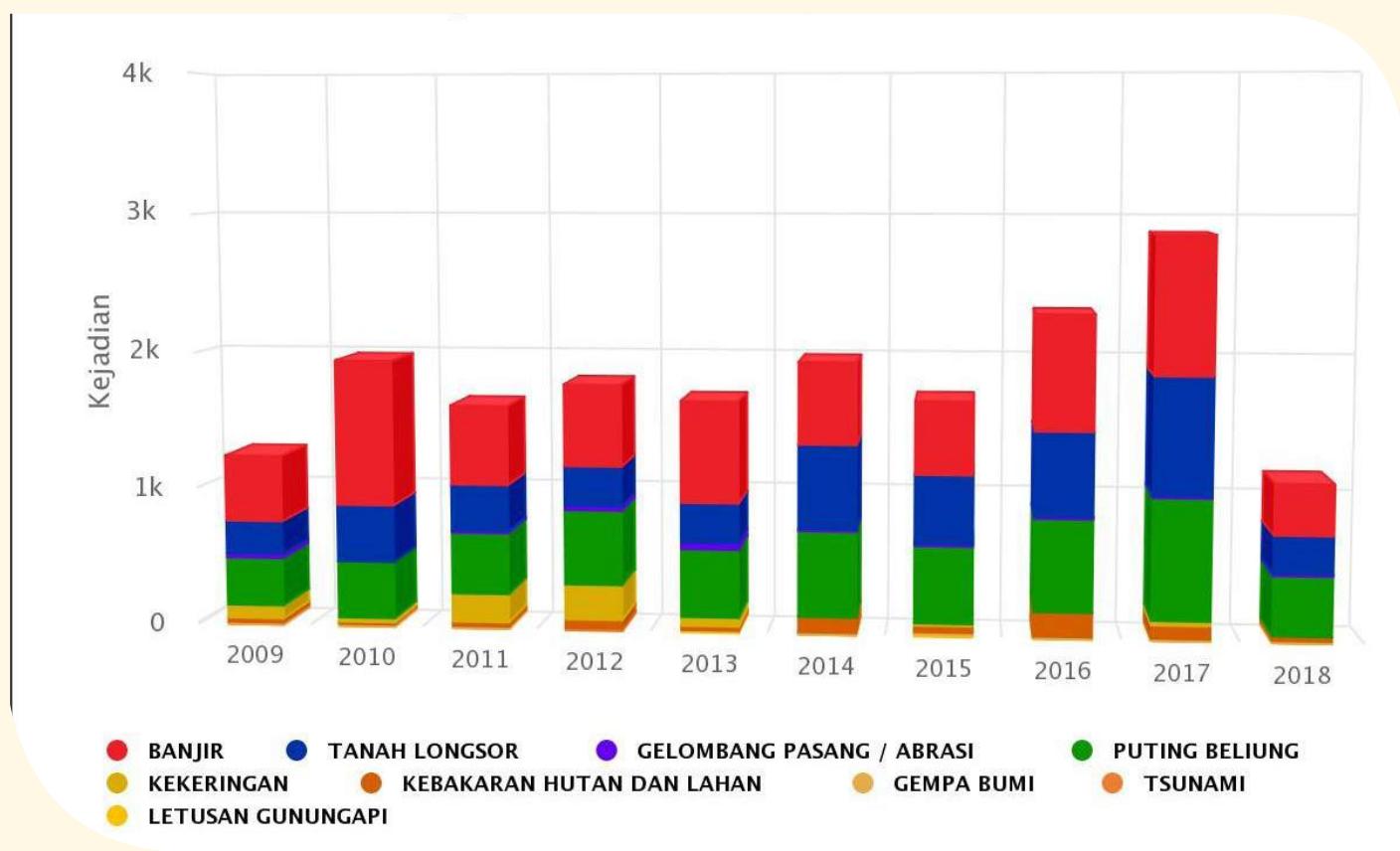
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan dikenal pula sebagai zamrud katulistiwa. Namun, dibalik sumber daya alam yang melimpah, Indonesia merupakan negara yang rawan akan terjadinya bencana. Berada pada 3 lempeng tektonik aktif yaitu Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik serta kondisi hidrometeorologi

menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, puting beliung, bahkan tsunami (Maarif, 2012). Selain itu, Indonesia juga terletak di tengah-tengah daerah Cincin Api Pasifik. Cincin Api Pasifik atau *Circum-Pacific belt* sering disebut sebagai penyebab Indonesia sering mengalami gempa dan juga memiliki banyak gunung berapi. Hal tersebut menjadikan berbagai jenis

bencana alam menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Data kejadian berbagai macam bencana alam dari kurun waktu tahun 1999-2008, menunjukkan bahwa 95% dari mereka yang kehilangan nyawa disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami (Ma'arif, 2012).

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa sebagian besar bencana yang terjadi disebabkan oleh

Gambar 1.1 Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir



(Sumber : BNPB.go.id, 2018)

bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut mengisyaratkan ancaman fisik yang secara nyata dihadapi oleh bangsa Indonesia bukanlah perang, tetapi bencana alam yang jika tidak diantisipasi sejak dini akan banyak menimbulkan korban jiwa. Sejarah kejadian bencana menunjukkan ada peningkatan dari waktu ke waktu, bahwa Indonesia dianggap sebagai "supermarket bencana" dan sekarang berubah menjadi "laboratorium bencana" tempat banyak negara belajar cara menanggulanginya (Ma'arif, 2012).

Secara geografis Indonesia membentang dari  $6^{\circ}$  LU sampai  $11^{\circ}$  LS dan  $92^{\circ}$  sampai  $142^{\circ}$  BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga per-empat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km<sup>2</sup>), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada (Lasubuda, 2013). Sebagai negara

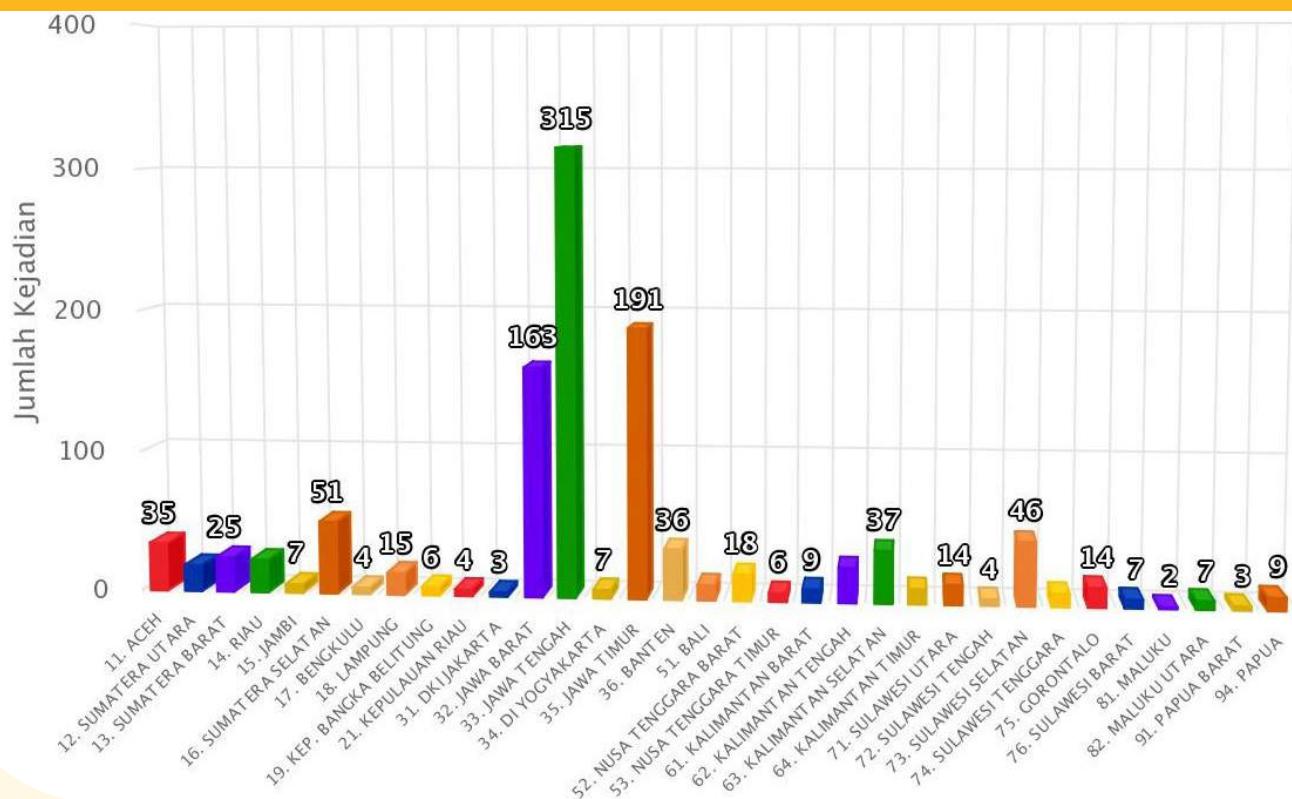
kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan territorial dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Lasubuda, 2013).

Struktur geografi wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan ini jika disandingkan dengan ancaman bencana yang mengintai Indonesia, menjadikan permasalahan baru yaitu sulitnya akses ke lokasi-lokasi bencana yang tidak hanya dapat terjadi di pulau-pulau besar, tetapi sangat mungkin terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia yang jauh dari pusat kota.

Pada gambar 2.2 terlihat bahwa kejadian bencana di Indonesia tidak hanya terjadi di pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa, tetapi bencana yang terjadi mengancam pula pulau-pulau kecil dan pulau-pulau yang jauh dari pusat kota. Pulau-pulau ini kemudian yang akan sulit dilakukan mobilisasi baik itu mobilisasi sumber daya maupun mobilisasi bantuan ketika terjadi bencana.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dengan luas lautnya  $\pm$  5,8 juta km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai  $\pm$  81.000 km (Rianto dkk, 2017) Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus melakukan banyak hal untuk memberikan berbagai pelayanan publik terutama pelayanan medis yang merupakan kebutuhan primer setiap orang. Sesuai UUD 1945 pasal 28 H dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Gambar 2.2 Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Provinsi di Indonesia



Sumber: BNPB, 2018

mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pemanfaatan rumah sakit masih terbatas di daerah perkotaan. Kendala yang dihadapi wilayah terpencil adalah minimnya tenaga medis dan kendala geografis (Rizaldi dkk, 2015).

Hasil sensus tahun 2010 populasi penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 juta jiwa (BPS, 2015). Penduduk yang berada di wilayah luar pulau Jawa, khususnya di pulau-pulau kecil Indonesia kondisinya masih sangat membutuhkan bantuan, khususnya bantuan kesehatan. Kondisi ini akan semakin buruk dengan ancaman bencana yang ada di Indonesia. Kebutuhan fasilitas kesehatan di daerah terpencil terutama pada saat bencana akan semakin besar.

Salah satu komponen yang terjun langsung dalam pemberian bantuan kepada korban bencana alam adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMPS) yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya kelengkapan alutsista TNI dalam OMPS kebencanaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penanggulangan akibat bencana dan memberikan bantuan kemanusiaan. Melihat ancaman bencana yang ada serta struktur geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau-

pulau, kebutuhan akan kapal Rumah Sakit (RS) sangat diperlukan dalam OMPS tersebut. Saat ini, TNI hanya memiliki satu Kapal RS yaitu Kapal RS dr. Soeharso (SHS)-990. Jumlah ini tentunya kurang mengingat struktur geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Oleh karenanya penulis akan membahas mengenai analisis kebutuhan kapal RS TNI dalam operasi militer selain perang menanggulangi bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

### Pembahasan

Kejadian bencana alam tentunya menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa maupun korban luka-luka. Penanganan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, menjadi faktor penting dalam mengurangi jumlah korban jiwa pada saat bencana terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa peran rumah sakit sangatlah besar. Dalam kondisi kegawatdaruratan bencana, ketersediaan rumah sakit yang dapat diakses oleh korban sangat diperlukan. Ketersediaan terhadap akses pelayanan kesehatan saat kondisi kedaruratan merupakan salah satu upaya mewujudkan keamanan nasional (Anwar, 2016).

Keberadaan rumah sakit bergerak sangat diperlukan pada saat kondisi kegawatdaruratan. Rumah sakit bergerak dapat berupa rumah sakit lapangan, kapal rumah sakit, atau pesawat rumah sakit yang dimiliki oleh unsur kesehatan dari Tentara Nasional Indonesia (organisasi militer). Rumah sakit bergerak ini sangat efektif karena lokasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perawatan pada saat itu. Rumah sakit bergerak juga sangat

efektif dalam mendukung misi-misi kesehatan membantu korban akibat bencana alam (Anwar, 2016).

Berhadapan dengan ancaman bencana yang tinggi di Indonesia, tentunya diperlukan suatu pencegahan dan mitigasi yang baik untuk meminimalisir jumlah korban jiwa. Salah satu upaya pencegahan dan mitigasi adalah tersedianya sarana dan prasarana yang baik dalam upaya penanggulangan korban bencana maupun konflik. Kapal Rumah Sakit merupakan salah satu prasarana penunjang yang penting dalam untuk meminimalisir jumlah korban. Selain dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan, kapal rumah sakit juga dapat digunakan untuk memobilisasi sumber daya manusia yang dapat menolong korban bencana alam dan juga tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan medis kepada korban

Indonesia memiliki satu unit Kapal Rumah Sakit yaitu KRI dr Soeharso. Bergabung armada Angkatan Laut pada tahun 2003, KRI dr Soeharso adalah satu-satunya kapal rumah sakit di dalam negeri. Dengan panjang 122 meter, KRI dr Soeharso adalah kapal *platform* pendarat (LHD). Dalam situasi darurat kapal dapat menampung 400 tentara dan 3.000 penumpang.

KRI dr. Soeharso sebagai kapal rumah sakit mempunyai peran strategis dan dapat menjadi pilihan utama dalam pelayanan kesehatan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk dalam penanganan bencana. Berbagai operasi pelayanan kesehatan dan pelayanan kebencanaan telah dijalankan oleh KRI dr. Soeharso dan terbukti Kapal

Tabel 1. Kegiatan Operasi KRI dr. Soeharso  
Tahun 2014 s.d 2015

Tahun	No.	Jenis Operasi	Waktu
2014	1.	Ops. Mentawai Megathrust Direx (Pelayanan Kesehatan)	15 hari
	2.	Ops. Multilateral	18 hari
	3.	Ops. SBJ LXIII/ Sail Raja Ampat (pelayanan Kesehatan)	28 hari
	4.	Ops. Bansos Baweam (Pelayanan Kesehatan)	3 hari
	5.	Demo Sailing Pass Sertijab Panglima	3 hari
2015	1.	Ops. Perisai Samor	30 hari
	2.	Ops. Baksos Banten dan SAR L. Jakarta	13 hari
	3.	Ops. Komando Jaya & Jayapura (pelayanan kesehatan)	45 hari
	4.	Ops. SBJ/XIV & Sail Tomini	36 hari
	5.	Ops. HUT TNI	10 hari
	6.	Ops. Latek Pelavaran	6 hari
	7.	Ops. Evakuasi Kabut Asap Kalses (penanganan kebencanaan)	15 hari

(Sumber: Rianto dkk, 2017)

Rumah Sakit sangat dibutuhkan di Indonesia. Berikut kegiatan operasi KRI dr. Soeharso.

KRI dr. Soeharso dikukuhkan sebagai Kapal Bantu Rumah Sakit pada 17 September 2008 (sebelumnya merupakan Kapal Bantu Angkut Personel KRI Tanjung Dalpele) Selain kegiatan pada tabel 1, sebelum difungsinya sebagai kapal bantu RS pun, KRI dr. Soeharso telah melakukan berbagai operasi pelayanan kesehatan dan kebencanaan seperti Operasi Bakti Sosial Kesehatan setiap tahun (surya Bhaskara Jaya dan Baksos TNI Terpadu) di pulau-pulau terdepan

dan pulau terpencil, Operasi Bantuan Bencana Tsunami 2004 dan Operasi Bantuan Bencana Gempa Sumatra Barat Tahun 2009.

Tahun 2018, banyak kejadian bencana dan timbulnya korban jiwa dan luka-luka sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai bagi para korban bencana. Hal ini tentunya harus sudah diantisipasi oleh pemerintah mengingat risiko bencana yang tinggi memang mengancam di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kejadian bencana besar yang terjadi pada Agustus 2018 yaitu gempa bumi 7 SR di Lombok menyebabkan 436

orang meninggal dunia. Sebaran korban meninggal dunia adalah di Kabupaten Lombok Utara 374 orang, Lombok Barat 37 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Timur 12 orang, Lombok Tengah 2 orang dan Kota Denpasar 2 orang. Korban luka-luka tercatat 1.353 orang, dimana 783 orang luka berat dan 570 orang luka ringan. Korban luka-luka paling banyak terdapat di Lombok Utara sebanyak 640 orang. Lombok Utara adalah daerah yang paling terdampak gempa karena berdekatan dengan pusat gempa 7 SR. Sebaran pengungsi terdapat di Kabupaten Lombok Utara 137.182 orang, Lombok Barat 118.818

orang, Lombok Timur 78.368 orang, dan Kota Mataram 18.368 orang (Nugroho, 2018).

KRI dr. Soeharso di berangkatkan untuk misi penanganan bencana di Lombok sesaat setelah kejadian bencana tersebut dengan 65 dokter dan perawat serta tenaga farmasi. Di tubuh kapalnya, masih terdapat satu hanggar semi terbuka yang bisa menampung satu helikopter sedang. Sebagai kapal rumah sakit, kapal perang ini dilengkapi satu ruang UGD, tiga ruang bedah, enam ruang poliklinik, 14 ruang klinik dan dua bangsal perawatan inap dengan kapasitas standar 40 tempat tidur (Marboen, 2018).

Setelah kejadian gempa Lombok, September 2018 terjadi gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu dan Donggala. Jumlah korban meninggal akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah

(Sulteng) per 25 Oktober 2018 yang diolah BNPB, korban tewas dalam bencana itu mencapai 2.081 orang.

KRI dr. Soeharso diberangkatkan pada misi penanganan kebencanaan ini dengan jumlah personel sebanyak 93 personel dan ada tambahan dari Universitas Hasanudin sebanyak 17, Universitas Airlangga sebanyak 5 orang dan tambahan lain. Dari tim yang diberangkatkan, semua ahli bedah lengkap.

Mengingat keberfungsiannya Kapal RS terutama pada misi penyelamatan dan penganganan bencana, sudah seharusnya Indonesia menambah jumlah Kapal Rumah Sakit. Kejadian bencana selalu menimbulkan jumlah korban yang tidak sedikit. Semakin banyak jumlah Kapal RS tentunya sangat membantu dalam mempercepat penanganan korban sehingga mengurangi korban jiwa. Terlebih lagi, melihat kondisi

geografis Indonesia, kapal RS sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan di pulau-pulau terpencil yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tidak ada referensi yang menyebutkan berapa jumlah kapal RS yang diperlukan suatu negara. Namun, melihat kondisi geografis Indonesia, dan risiko Indonesia terhadap bencana diperlukan lebih dari satu Kapal Rumah Sakit yang dapat membantu dalam upaya pelayanan medis dan kegawatdaruratan. Berdasarkan penuturan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, idealnya Indonesia memiliki 10 Kapal Rumah Sakit (Hadi, 2018). Penuturan ini menguatkan bahwa penambahan jumlah kapal RS di Indonesia sangat diperlukan mengingat fungsinya yang sangat krusial yaitu terkait penanganan medis dan penyelamatan korban.





## Penutup

Penambahan jumlah KRI RS di Indonesia sangat diperlukan mengingat risiko bencana yang ada di Indonesia dan struktur geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan menyebabkan pelayanan kesehatan yang lebih fleksibel dan menjangkau setiap wilayah sangat diperlukan. Keberadaan KRI dr. Soeharso dalam penanganan kebencanaan dan pelayanan kesehatan di Indonesia sangat dibutuhkan untuk meminimalisir jumlah korban. Penambahan jumlah kapal RS untuk penanganan bencana dan pelayanan medis akan sangat signifikan membantu dalam pelayanan kesehatan dan penanganan korban.\*\*\*

## Daftar Pustaka

Anwar, Syaiful. 2016. *Melindungi Negara*. Cetakan Pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta

Darwanto, Hery. *Operasi Militer Selain Perang*. Kementerian Pertahanan RI

Hadi, Syaiful. 2018. *TNI: Idealnya Indonesia*

Punya 10 Kapal Bantu Rumah Sakit. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://nasional.tempo.co/read/1109849/tni-idealnya-indonesia-punya-10-kapal-bantu-rumah-sakit/full&view=ok>

Jakarta Greater. 2016. *TNI AL Siap Beli 2 Kapal Rumah Sakit*. Diakses pada 30 Agustus 2018 dari <https://jakartagreater.com/tni-al-siap-beli-2-kapal-rumah-sakit/>

Lasubuda, Ridwan. 2013. *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Platax Volume 1-2 Januari 2013 ISSN: 2302-3589

Marboen, Ade P. 2018. *Kapal Rumah Sakit KRI dr. Soeharso Siap Meluncur Ke Lombok*. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.liputan6.com/health/read/3610524/kapal-rumah-sakit-kri-dr-soeharso-siap-meluncur-ke-lombok>

Nugroho, Sutopo Purwo. 2018. *Dampak Gempa Lombok : 436 Orang Meninggal dan Kerugian Ekonomi Lebih Dari 5.04 Trilyun Rupiah*. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://bnpb.go.id/dampak-gempa-lombok-436-orang>

Persada, Sailendra. 2012. *TNI: Idealnya*

*Indonesia Punya 10 Kapal Bantu Rumah Sakit*. Diakses pada 30 Agustus 2018 di <https://nasional.tempo.co/read/1109849/tni-idealnya-indonesia-punya-10-kapal-bantu-rumah-sakit/full&view=ok>

Rianto, Fransiskus Sugeng. 2017. *Implementasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr. Soeharso 990 pada Operasi Militer Selain Perang (OMPS)*. Jurnal Prodi Strategi dan Kampanye Militer volume 3 Nomor 1 Tahun 2017

Rizaldy, Chairul; Chrismianto, Deddy; Amiruddin, Wilma. 2015. *Studi Perancangan Kapal Rumah Sakit Tipe Katamaran untuk Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Wilayah Pesisir di Provinsi Papua Barat dan Papua*. Jurnal Teknik Perkapalan - Vol. 3, No.4 Oktober 2015

Sulistyo, Muhamad. *Implementasi Tugas Operasi Militer Selain Perang Kodam I/Bukit Barisan dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo*. Universitas Medan Area

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

## PARTISIPASI PUSREHAB KEMHAN DI INDONESIA 2018 ASIAN PARA GAMES

Oleh:

Erlin sudarwati, SKM.,MM

Kasubbid Minvok Bid Rahabvok Pusrehab Kemhan RI



### Pendahuluan

**I**ndonesia 2018 Asian Para Games (INAPG 2018) adalah ajang olahraga khusus atlet penyandang disabilitas pertama tingkat Asia yang diselenggarakan di Indonesia. Asian Para Games diselenggarakan oleh Komite Paralimpiade Asia setiap empat tahun sekali, dengan atlet-atlet penyandang disabilitas dari seluruh Asia.

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan) merupakan instansi yang menyelenggarakan rehabilitasi

terpadu bagi para penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI, salah satu kegiatannya adalah bimbingan olahraga yang diarahkan untuk meningkatkan bakat olahraga yang dimiliki oleh penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI agar dapat berprestasi.

Adanya Asian Para Games yang diselenggarakan di Indonesia, Pusrehab Kemhan berpartisipasi dalam mendukung kegiatan tersebut baik pengiriman atlet penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI maupun personel yang tergabung dalam kepanitiaan dan sarana

transportasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan para atlet Asian Para Games, serta sebagai supporter dalam memberikan motivasi bagi para atlet yang sedang bertanding.

### Asian Para Games 2018

Indonesia 2018 Asian Para Games diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 13 Oktober 2018 di Jakarta, tepatnya Gelora Bung Karno, Jakarta International Velodrome dan JIExpo. Upacara pembukaan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Oktober 2018, sementara

upacara penutupan diadakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada tanggal 13 Oktober 2018. Indonesia adalah tuan rumah ketiga. Asian Para Games yang pertama kali diadakan di Guangzhou, Cina, pada tahun 2010, sedangkan Asian Para Games kedua berlangsung di Incheon, Korea Selatan pada tahun 2014.

Dalam rangka mensukseskan kegiatan Indonesia 2018 Asian Para Games, maka dibentuklah Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC) yang bertugas mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan INAPG 2018. Selain itu, INAPGOC juga ingin secara aktif mempromosikan olahraga khusus penyandang disabilitas kepada masyarakat Indonesia sehingga di masa depan dukungan antusiasme terhadap olahraga untuk penyandang disabilitas akan terus meningkat. Selanjutnya kegiatan ini diharapkan sebagai langkah pertama untuk menjadikan

kesempatan berolahraga menjadi hak bagi semua lapisan masyarakat.

Pada event Asian Para Games kali ini, ada 18 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan 512 nomor pertandingan. Banyaknya nomor per tiap cabang olahraga disebabkan karena para games punya nomor berbeda untuk mengklasifikasikan atlet sesuai latar belakang fisiknya. Cabang olahraga yang dipertandingkan adalah anggar kursi roda, basket kursi roda, bersepeda, boccia, bulu tangkis, catur, goal ball (bola gawang), judo, lawn bowls (bowling lapangan), panahan, para atletik, para powerlifting (angkat beban), para swimming (renang), shooting (menembak), tenis kursi roda, tenis meja, tenpin bowling, dan voli duduk. Adapun jumlah negara yang berpartisipasi di Indonesia 2018 Asian Para Games ada 43 negara dengan jumlah atlet sebanyak 2762 atlet penyandang disabilitas.

Motto Indonesia 2018 Asian

Para Games adalah "The Inspiring Spirit and Energy of Asia" (Semangat Inspirasi dan Energi Asia). Melalui kegiatan ini diharapkan keberhasilan dan aksi para atlet penyandang disabilitas dapat menjadi sumber inspirasi dan memotivasi individu lainnya di seluruh Indonesia.

### Partisipasi Pusrehab Kemhan

Pusrehab Kemhan sebagai instansi yang menyelenggarakan Rehabilitasi Terpadu bagi para penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI, salah satu kegiatannya adalah bimbingan olahraga untuk meningkatkan bakat olahraga yang dimiliki oleh penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI agar dapat berprestasi. Dengan adanya event Indonesia 2018 Asian Para Games, merupakan kesempatan bagi atlet penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI dari hasil bimbingan Pusrehab Kemhan untuk ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga khusus atlet penyandang



Sumber: Penulis

disabilitas tingkat Asia ini. Meskipun belum memperoleh medali kejuaraan, namun setidaknya sudah ikut berjuang membawa nama Indonesia dan juga sebagai motivasi untuk lebih giat berlatih serta menjadi inspirasi bagi penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI yang lain.

Adapun atlet penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI yang berpartisipasi pada Indonesia 2018 Asian Para Games antara lain:

Adapun kendaraan dinas Pusrehab Kemhan yang ikut mendukung kegiatan Indonesia 2018 Asian Para Games, sebagai sarana transportasi dalam beberapa rangkaian kegiatan antara lain 1 unit Kendaraan Bus Khusus Disabilitas (Mitsubishi/FE84BC Bus No Reg 7406-00) beserta personel yang mengawaki yaitu Peltu Lis Wahab Syahroni dan Pengda Tk.I II/b Seplili, serta 1 unit Kendaraan Elf Khusus Disabilitas (Isuzu NKR 55 C/O E2 L WB No Reg 7405-00) beserta personel yang mengawaki

disabilitas personel Kemhan dan TNI peserta Rehabilitasi Terpadu berserta staf Pusrehab Kemhan juga berkesempatan menyaksikan jalannya pertandingan olahraga yang diikuti atlet Pusrehab Kemhan dengan menjadi *supporter* untuk memberikan motivasi dan semangat dalam bertanding.

### Penutup

Dengan adanya event Indonesia 2018 Asian Para Games diharapkan bisa menjadi motivasi dan semangat

NO	NAMA ATLET PANGKAT/NRP/NIP	MACAM DISABILITAS	CABANG OLAH RAGA
1.	Puji Sumartono Kopda/31970071680277	Amputasi Atas Lutut Kanan	Tenis Kursi Roda
2.	Maryanta Penda Tk. I III/b 196603131996031001	Kelemahan anggota Gerak Kiri	Tenis Kursi Roda
3.	Aris Hariyadi Pelda/ 3930191531172	Amputasi Bawah Lutut Kanan	Menembak
4.	Dwi Retno Sulanjari Pelda/514609	Kelemahan kaki kanan	Menembak
5.	Jeni Susilo Serda/542039	Amputasi Batas Lutut Kiri	Menembak

Sedangkan personel Pusrehab Kemhan yang mendukung kegiatan Indonesia 2018 Asian Para Games, sebagai panitia pelaksana masuk dalam Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC) antara lain: Kolonel Kes. Wahyu Dwi Santosa, M.M, sebagai Members Divisi Klasifikasi Deputi 1 Games Operation, Letkol Ckm (K) dr. Endang Ernandini, Sp.RM., MARS dan Penata Tk.I III/d dr. Rifqi Averrouza Hasbiandra sebagai Classification Observer Sport Tenpin Bowling.

yaitu Kopka Fahroji dan Honorer Guntoro.

Partisipasi Pusrehab Kemhan juga diwujudkan dengan kehadiran dalam memenuhi undangan acara Pembukaan (Opening Ceremony) Indonesia 2018 Asian Para Games pada tanggal 6 Oktober 2018 oleh Kapusrehab dan para Pejabat eselon 3 Pusrehab Kemhan, serta para Penyandang disabilitas Personel Kemhan dan TNI peserta Rehabilitasi Terpadu Pusrehab Kemhan. Selain menghadiri acara Opening Ceremony, para penyandang

bagi penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI, bahwa dengan kondisi yang tidak lagi seperti semula sebagai prajurit TNI namun masih bisa berjuang dan berprestasi mengharumkan nama negara dan bangsa Indonesian dengan cara yang berbeda, yakni dengan prestasi olahraga penyandang disabilitas.

Sesuai dengan motto Indonesia 2018 Asian Para Games adalah "The Inspiring Spirit and Energy of Asia" (Semangat Inspirasi dan Energi Asia), diharapkan keberhasilan dan aksi



Sumber: Penulis

para atlet penyandang disabilitas dapat menjadi sumber inspirasi dan memotivasi individu lainnya di seluruh Indonesia, khususnya penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI yang sedang melaksanakan Rehabilitasi Terpadu di Pusrehab Kemhan.\*\*\*



Logo Asian Para Games 2018



"Momo" (*Motivation and Mobility*)  
maskot Asian Para Games 2018

## KEMHAN / TNI AJUKAN PERMOHONAN KENAIKAN ANGGARAN DALAM RAKER DENGAN KOMISI I DPR RI



Kemhan RI/TNI mengajukan pagu indikatif anggaran sebesar 107 triliun dari anggaran yang semula ditetapkan pemerintah sebesar 106 triliun. Artinya ada kenaikan anggaran sebesar 1 triliun untuk T.A. 2019. Pengajuan kenaikan anggaran tersebut diungkapkan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menhan RI Ryamizard Ryacudu, Sekjen Kemhan Marsdyo TNI Hadiyan Sumintaatmadja, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta, Rabu (5/9).

Saat ditemui sejumlah awak media usai mengikuti raker dengan Komisi I, Sekjen Kemhan mengatakan agenda rapat kerja kali ini adalah untuk membahas Pagu Anggaran Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kemhan/TNI T.A. 2019.

Kenaikan anggaran tersebut, lanjut Sekjen, akan dipergunakan dan diefektifkan untuk seluruh kebutuhan Kemhan/TNI diantaranya untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang. Usulan kenaikan anggaran Kemhan/TNI didasarkan atas kebutuhan Kemhan/TNI yang diperkirakan ada 215 kegiatan. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR.

Kemhan/TNI menyadari bahwa pemerintah memiliki prioritas lain atas anggaran Kementerian dan Lembaga. Untuk itu kenaikan anggaran ini akan dipergunakan dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan Kemhan/TNI.

Dalam raker yang dipimpin Abdul Kharis Almasyhari, Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan Kemhan/TNI terkait pagu anggaran RKA-KL Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti.\*\*\*

## MENHAN HADIRI UPACARA HUT KE-73 TNI DI MABES TNI



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri Upacara Peringatan Upacara Hari Ulang Tahun Ke-73 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, Jum'at (5/10) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman. Sementara Kasad Jenderal TNI Mulyono memimpin HUT TNI di Merauke, Papua.

Upacara HUT TNI tahun ini dilaksanakan secara sederhana melalui upacara dan pemotongan tumpeng oleh Presiden RI. Pengelegaran Upacara Hari Ulang Tahun TNI Ke-73 juga digelar secara serentak di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke.

Tema peringatan HUT TNI ke-73 kali ini adalah "Profesionalisme TNI Untuk Rakyat". Makna dari tema tersebut adalah prajurit TNI yang berbasis kompetensi, prajurit TNI harus kuat, handal dan semua tugas serta kewajibannya didharmabaktikan untuk rakyat, yang senantiasa dipagari oleh doktrin Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan nafas bagi semua prajurit berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Moment HUT Ke-73 TNI, Kemhan Luncurkan Seragam PDU I Bagi ASN Kemhan

Sementara itu bersamaan dengan kegiatan Upacara HUT TNI tahun ini, di dua tempat berbeda yakni di Sabang dan Merauke, Kementerian Pertahanan meluncurkan Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan.

PDU yang diluncurkan merupakan jenis PDU I yang

digunakan untuk acara-acara ceremony resmi seperti pelantikan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, kenaikan pangkat, hingga HUT Negara dan HUT TNI.

Momentum Upacara HUT TNI tahun ini menjadi waktu sangat tepat bagi peluncuran pakaian PDU I untuk ASN Kemhan sekaligus menjadi sejarah baru, dimana PDU I pada awalnya hanya dikenakan oleh Prajurit TNI-Polri, namun saat ini juga dikenakan oleh ASN Kemhan.

ASN Kemhan adalah ASN yang berdinastis tidak hanya meliputi di Kemhan tetapi juga di jajaran Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Kemhan sendiri mengatur tata cara dan jenis PDU tersebut dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Seragam di Kemhan.\*\*\*



## LOMBA PCTA LAHIRKAN 4080 KADER BELA NEGARA TERBAIK DARI 34 PROVINSI DI INDONESIA

Lomba Diskusi Parade Cinta Tanah Air (PCTA) antar Perguruan Tinggi (PT) dan SLTA sederajat yang diikuti 4080 peserta dari 34 provinsi ini melahirkan sejumlah warga bela negara. Ini artinya kader bela negara bertambah 4080 orang dimana mereka adalah peserta PCTA yang telah mendapat sertifikat dari Dirjen Pothan Kemhan sebagai kader bela negara terbaik dari daerahnya masing-masing.

Saat memberi pengarahan sekaligus membuka 'Lomba Diskusi antar Perguruan Tinggi PCTA Tingkat Pusat Tahun 2018' di Bandung, Kamis (20/9), Menhan Ryamizard Ryacudu berpesan untuk mempertahankan apa yang telah dibuat karena apa yang dibuat hari

ini dapat berguna bagi bangsa dan negara ini.

Menhan juga berpesan kepada peserta PCTA untuk menjadi generasi masa depan yang maju dan unggul serta berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak berhenti untuk berkarya. Selain itu generasi muda harus memiliki kekuatan integritas, Pancasilais, mental yang kokoh, ulet dan kokoh demi kemajuan bangsa dan negara.

Karena para peserta PCTA adalah putra/i terbaik bangsa yang memiliki keistimewaan dan mampu menunjukkan keteladanan sebagai pelajar terpilih yang berprestasi, berdisiplin dan bermoral serta memiliki jiwa nasionalisme yang

tinggi. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat yaitu, "Mewujudkan Generasi Muda Berkarakter, Maju, Mandiri dan Cinta Tanah Air".

Demikian halnya dengan Ibu Nora Ryamizard Ryacudu saat memberikan arahan kepada peserta PCTA bahwa peserta diharapkan memiliki karakter sesuai dengan harapan, cita-cita dan tujuan dari program yang diselenggarakan Kemhan setiap tahunnya ini.

Yaitu menjadi pemuda-pemudi yang memiliki karakter, menjadi harapan dan masa depan bangsa serta membentuk generasi muda yang kreatif dan inovatif dalam upaya mengisi kemerdekaan. Seorang anak yang berkarakter akan terlihat dari iman dan taqwanya.



Ibu Menhan berharap para peserta PCTA dapat menjadi ikon dan embrio yang positif bagi generasi muda lainnya. Namun yang terpenting adalah setiap generasi haruslah lebih baik dari generasi sebelumnya dan lebih peka dari generasi sebelumnya.

Selain lomba diskusi, dalam PCTA yang dilaksanakan mulai Maret – Agustus 2018 ini juga ditampilkan karya dan inovasi para mahasiswa dan pelajar SLTA sederajat se-Indonesia. Mereka adalah generasi muda yang merupakan duta-duta daerah yang telah mengikuti seleksi di tingkat daerah dan berhak untuk tampil di tingkat pusat guna menguji hasil inovasi dan temuan yang telah mereka ciptakan di daerah.

Lomba diikuti 240 tim dengan jumlah peserta 4080 orang dengan rincian peserta dari tingkat SLTA

diikuti 120 tim dengan peserta berjumlah 2040 orang. Sedangkan di tingkat PT diikuti 34 tim dari 34 provinsi dengan peserta berjumlah 68 orang.

Tampil sebagai pemenang lomba karya Inovasi tingkat PT adalah tim dari Papua yang diwakili Univ. Cendrawasih, dengan hasil karya "Beras Analog Berbahan Dasar Sagu yang Diformulasikan dengan Daun Kelor dan Buah Merah." Sedangkan juara kedua diraih Prov. Jawa Tengah yang diwakili Univ. Tidar Magelang dan juara ketiga diraih Univ. Mulawarman Kaltim.

Sedangkan juara pertama tingkat SLTA sederajat diraih SMKN 1 Tanjung Pinang dari Prov. Kepri, juara kedua dari Prov. Gorontalo yaitu SMAN 1 Telaga dan juara ketiga diraih SMAN 2 Wonogiri, Jawa Tengah.

Tampil sebagai juara favorit pertama untuk tingkat PT adalah Univ. Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara dan juara Favorit kedua diraih Univ. Achmad Dahlan Jogjakarta dan juara Favorit ketiga diraih Univ. Syah Kuala Banda Aceh. Sedangkan di tingkat SMA tampil sebagai juara favorit pertama adalah SMAN 2 Amlapura Bali, favorit kedua diraih SMAN 26 Jakarta dan favorit ketiga diraih SMAN 9 Bandar Lampung.\*\*\*



## MENHAN RI MENJADI PEMBICARA DALAM ACARA DISKUSI MEDIA FORUM MERDEKA BARAT 9

**M**enteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjadi pembicara dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan tema “Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum dan Tata Kelola”, Kamis (25/10) di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Dalam Diskusi tersebut, Menhan memaparkan pencapaian kinerja empat tahun pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan dalam bidang kebijakan pertahanan negara. Diungkapkan Menhan, pengembangan desain dan sistem Pertahanan negara yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir, telah menempatkan

Indonesia saat ini berada pada urutan ke 10 besar kekuatan pertahanan dunia, dimana sebelumnya berada pada urutan ke 19.

Beberapa pencapaian kinerja Kemhan yang dipaparkan oleh Menhan dalam kesempatan tersebut mulai dari pencapaian pembangunan kemampuan postur pertahanan, penguatan TNI, pembangunan Alutsista, penguatan kerjasama pertahanan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, sampai dengan pembentukan kader bela negara.

Menhan mengatakan, ukuran pengembangan kemampuan yang menjadi arah pembangunan jangka panjang adalah kemampuan postur pertahanan yang dapat menjamin

kedaulatan negara, keselamatan bangsa, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat yang tersebar dan beragam, termasuk pulau-pulau kecil terdepan, wilayah yurisdiksi laut hingga meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Landas Kontinen serta Ruang Udara Nasional.

Pembangunan tersebut diarahkan secara sinergis dan berkesinambungan untuk mewujudkan postur pertahanan RI yang kuat, handal dan disegani ditingkat regional. Disamping itu juga dapat mendukung posisi tawar indonesia dalam ajang diplomasi pertahanan yang pada akhirnya mampu dan efektif untuk menangkal



dan menghadapi semua bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara; keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan keselamatan bangsa.

Untuk penguatan TNI sebagai komponen utama dilakukan melalui pembangunan kesiapan operasi dengan penambahan Divisi 3 Kostrad, Armada 3, Pasmar 3 dan Koopsau 3 serta satuan kewilayahan.

Dalam konteks pembangunan Alutsista, Kemhan fokus penyiapan Alutsista untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman nyata serta pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI hingga tahun 2018 telah mencapai 61,8 persen.

Sementara itu guna menghadapi ancaman yang sangat nyata saat ini yaitu ancaman terorisme dan bencana alam, Kemhan telah mengambil langkah dan inisiatif melalui penguatan kerjasama

trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Philipina.

Kemhan juga mengeluarkan inisiatif kerjasama "Our Eyes" yang telah diadopsi resmi oleh ASEAN sebagai *platform* kerjasama pertukaran informasi strategis kawasan yang juga didukung oleh negara mitra lainnya seperti AS, Australia, China, Rusia, Jepang, Korea, India dan Selandia Baru.

Sedangkan di bidang pengembangan kemandirian industri pertahanan dalam negeri yang mana menjadi prioritas kebijakan Kemhan diarahkan untuk turut mendorong proses pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan visi Nawacita Presiden RI.

Dalam era Kabinet Kerja saat ini, sebagian produk Alutsista dalam negeri telah memiliki kualitas dan Performace yang handal dan prima didalam memperkuat Sistem

Pertahanan Negara Indonesia. Beberapa Negara Sahabat juga telah membeli Produk Alut Sista Indonesia, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, serta beberapa Negara di Eropa dan Afrika. Kedepannya Indonesia akan dilihat sebagai sebagai salah satu Produsen Alutsista potensial Internasional.

Terakhir terkait pencapaian pembentukan Kader Bela Negara, Menhan memaparkan bahwa hingga di tahun 2018 telah mencapai 83,4 juta kader Bela Negara dari target 100 juta pada akhir Tahun 2024.\*\*\*

Menhan RI Ryamizard Ryacudu menerima Delegasi dan Industri Pertahanan Kemhan Turki di Ruang Tamu Menhan



Menhan RI Ryamizard Ryacudu menerima Delegasi dan Industri Pertahanan Kemhan Jerman, di Ruang Tamu Menhan



Menhan RI Ryamizard Ryacudu pimpin pertemuan Defence Minister's Meeting (DMM) Indonesia-Australia di Bali.



Menhan RI Ryamizard Ryacudu menghadiri Malam Budaya International di Pusbahasa Badiklat Kemhan.



Menhan RI Ryamizard Ryacudu mewakili pemerintah memberikan sambutan pada hari jadi Negara Turki di Jakarta.







# WiRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## BUILDING MARITIME COMMUNITY AWARENESS IN THE STATE DEFENCE PERSPECTIVE

EDITION OF SEPTEMBER-OCTOBER 2018 - VOLUME 74 / NUMBER 58



BUILDING SUPPORTING  
COMPONENTS  
THROUGH THE SYNERGY OF  
STAKEHOLDERS

ANALYSIS OF THE NEEDS OF  
THE TNI HOSPITAL SHIP  
IN MILITARY OPERATION  
OTHER THAN WAR OF  
RESPONDING TO NATURAL  
DISASTERS

THE MINISTRY OF DEFENSE  
REHABILITATION CENTER'S  
PARTICIPATION  
AT THE INDONESIA 2018  
ASIAN PARA GAMES

ISBN 1693-0231



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



Kemhan RI



Kemhanri



kemhan RI



## EDITORIAL BOARD

### Advisors:

Minister of Defense  
General (Ret) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD  
Air Vice Marshal Hadiyan Sumintaatmadja

### Editor in Chief:

Head of Public Communication Center of MoD  
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos .

### Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public  
Communication Center  
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### Editors:

M. Adi Wibowo, M.Si.  
Captain Lindu Baliyanto.

### Graphic Designer:

Imam Rosyadi  
Mandiri Triyadi, S.Sos.

### Photo:

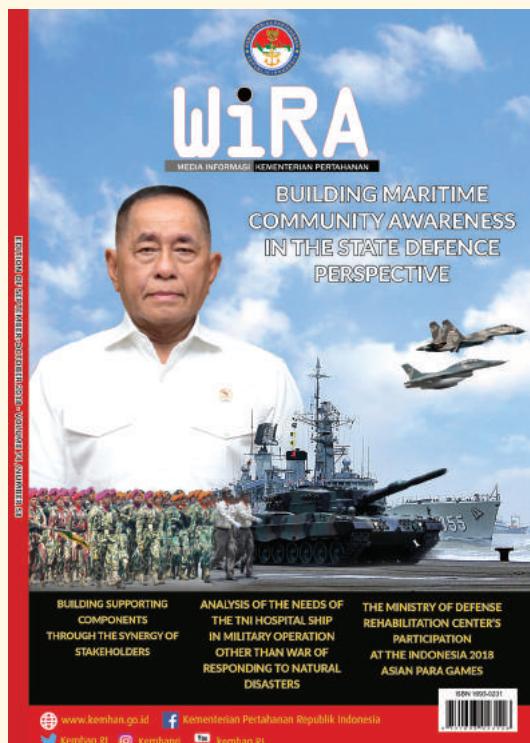
Photographers of Public Communication Center of  
MoD

### Distribution Staff:

Nadia Maretti,M.M.

#### Published by:

Public Communication Center of MoD,  
Jln. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta  
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457



# *Editorial*



Dear kind readers,

We warmly greet you through this fifth edition of WIRA of September-October 2018. It brings materials related to Building Maritime Community Awareness in the State Defence Perpective;Building Supporting Components Through the Synergy of Stakeholders; Analysis of the Needs of the TNI Hospital Ship in Military Operation Other Than War of Responding to Natural Disasters; The Ministry of Defense Rehabilitation Center's Participation at the Indonesia 2018 Asian Para Games.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). WIRA magazine can also be accessed online in [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

# Contents

## ARTICLE

6

### BUILDING MARITIME COMMUNITY AWARENESS IN THE STATE DEFENCE PERSPECTIVE

It is very important to develop and empowering the strong attitude and identity of the maritime community as one form of embodiment of national defense in order to ensure the survival of the NKRI towards the world's maritime axis.



12

### BUILDING SUPPORTING COMPONENTS THROUGH THE SYNERGY OF STAKEHOLDERS

Ministries/Institutions, the private sector and regional governments as stakeholders, who jointly develop Supporting Components, carry out national resources that are within and/or outside the management of the Ministry of Defense.

19

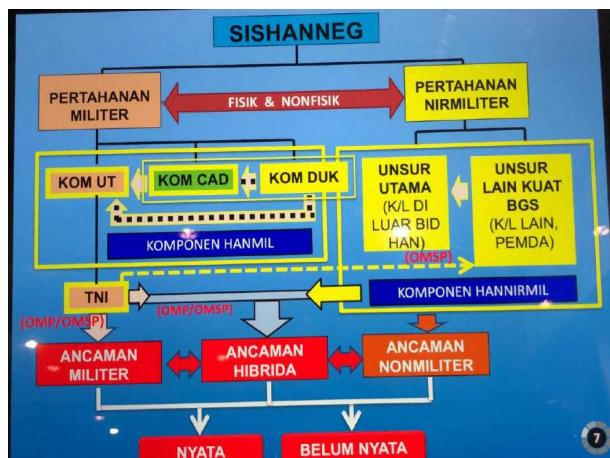
### ANALYSIS OF THE NEEDS OF THE TNI HOSPITAL SHIP IN MILITARY OPERATION OTHER THAN WAR OF RESPONDING TO NATURAL DISASTERS

The existence of a mobile hospital is very essential in the event of an emergency. Mobile hospitals can be in the form of field hospitals, hospital ships, or hospital aircraft owned by the health elements of the Indonesian National Army (military organization).

25

### THE MINISTRY OF DEFENSE REHABILITATION CENTER'S PARTICIPATION AT THE INDONESIA 2018 ASIAN PARA GAMES

The Indonesia 2018 Asian Para Games (INAPG 2018) is the first special sports event for athletes with disability at the Asian level held in Indonesia.



# BUILDING MARITIME COMMUNITY AWARENESS IN THE STATE DEFENCE PERSPECTIVE

By:

Commodore TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum

Deputy Dean of the Defense University's National Security Faculty

## Introduction

In order to welcome the era of globalization, Indonesia is also challenged with the different dynamics in the development of strategic environments. This will have an impact on the quality of the Indonesian nation in strengthening its national defense and security. The presence of Defending the State in the midst of the community

that provides guidance and examples of attitudes and behaviors to strengthen brotherhood, create order, maintain territorial integrity that is realized in the context of fighting for the nation's safety and national defense. Defense University (UNHAN) (2016) states that defending the country is an attitude and behavior of citizens inspired by his love for the Unitary State of the Republic of Indonesia

(NKRI) based on Pancasila and the 1945 Constitution in ensuring the survival of the nation and state. It can be said that the defense of the state focuses on the process of changing the attitudes and behaviour of the Indonesian people towards the souls of nationalism and patriotism in ensuring the sustainable prosperity of the NKRI.

One form of the glory of the



Nation and State of Indonesia is the vastness and abundance of the maritime resources that can be utilized by many people, especially coastal areas. The "Nawacita" program launched by President Joko Widodo also emphasizes the rise and strength of Indonesia's identity as a Maritime Country. Therefore, it is very important to develop and empowering the strong attitude and identity of the maritime community as one form of embodiment of national defense in order to ensure the survival of the NKRI towards the world's maritime axis.

Indonesia, which consists of thousands of islands and vast seas, certainly requires a call from each of its citizens to maintain and maintain

the condition of the islands and resources in the sea. The task related to safeguarding and securing the waters and the foremost islands is not only the obligation of the TNI and other security forces, but also as an absolute responsibility for the community at large.

This is stated in the Law No. 3 of 2002 Article 9 paragraph 1 concerning National Defense which reads "Every citizen has the right and obligation to participate in efforts to defend the state which is realized in the implementation of national defense". Therefore, defending the country in order to empower the maritime community in Indonesia also deserves more attention. Threats that come from outside can test the integrity of the nation and

state so that the empowerment of maritime communities is very urgent to be carried out in order to build awareness of defending the state in order to counteract any form of threat from outside parties.

## Discussion

### a. Culture and Character of Maritime Society

Foreign nationals who migrate will call their homeland as homeland or motherland which if translated in Indonesian is more appropriate to be interpreted as a motherland or motherland. This term may come from worshiping the Goddess of Fertility which is universal. Even though the ancestors of Indonesia also recognized the worship of the Goddess of Fertility, to call her homeland more appropriate with the term "homeland" considering that the Indonesian people of different ethnic groups occupy islands surrounded by vast oceans.

The Republic of Indonesia is an archipelagic country with distinctive characteristics of ethnic, language and cultural diversity. Physically between one and another culture, it is separated by the sea. However, the separation cannot be seen in terms of maritime affairs because all waters in the archipelago are unifying which integrate thousands of separate islands.

In a country called Indonesia, a large nation inhabits an island region and country, a multicultural nation in which there are two groups of life, namely community groups that inhabit in the coastal areas and community groups that inhabit in the rural areas. Whether we are aware or not, these two groups





Souce: Okilikit.blogspot.com

of people live in a dependence on the sea. All of that goes back to the concept of life and awareness of living space originating from this heterogeneity. Then in its history, it was also noted that antagonists desire to control each other from the two large groups themselves. Groups that live on land try to control the coast with all efforts to get results from the sea, and vice versa. (Utomo, B.B., 2017).

In general, the maritime community has a large portion of its livelihood in the sector of marine resources based, such as fishermen, fish farmers, sand mining and sea transportation. The level of education of the inhabitants of coastal areas is also relatively low. The environmental conditions of coastal communities, especially fishermen, are still not well organized and seem slum. With the socio-economic conditions of

the people who are relatively low in welfare, then in the long run the pressure on coastal resources will be even greater in order to meet community needs. Therefore, the following are the characteristics and characteristics of the maritime community:

1. Very influenced by the type of activity. For Examples: capture fisheries, pond fisheries business, and fisheries product management businesses that are indeed dominant are carried out.
2. Very influenced by environmental factors, seasons and markets.
3. The structure of the community is still simple and has not been widely entered by outsiders. This is because both cultures, living order,
- and community activities are relatively homogeneous and each individual feel that he has the same interests and responsibilities in implementing and overseeing the law that has been mutually agreed upon. This tends to make the level of education and welfare still at a fairly low level.
4. Most coastal communities work as fishermen. Fishermen are individuals who are Indonesian citizens or corporations whose livelihoods or business activities are fishing, especially in the sea area. (Pelosok, Q., 2013)
- b. Maritime Society and National Defense

The National Defense White

Paper describes that Indonesian national defense is structured in a universal defense system to achieve national goals. This universal state defense is essentially a form of defense that involves all citizens in accordance with their respective functions and roles. (Kemhan, 2015). The universal defense system itself combines military defense and non-military defense through efforts to build a strong and respected national defense force. It is prepared early and it is expected that it can work sustainably in the face of various types of threats. Therefore, the maritime community certainly has a role in the efforts of national defense.

The concept of an actual maritime society refers to social units that fully or most depend on their socio-economic life directly or indirectly on the use of marine resources and marine services. They consist of

working group units such as fishing and sailing communities, Navy and Marine Security Task Force, miners, traders and businessmen in the marine products industry, and tourism industry. They have their respective functions which begin in the order of the use of marine resources, safeguards, safeguards as well as in increasing the tourism sector. (Maynar, S., 2017).

Since the last few decades, the groups has not only been regarded as the successors and supporters of maritime culture in Indonesia, but also with no exception for all coastal communities and islands from Sabang to Merauke that have initiated and developed economic sectors related to resources and services - marine services around it. However, in terms of ownership aspects, the resources contain in the coastal and marine areas often have open access. With these open

access characteristics, ownership is not regulated, every person is free to utilize the resources so that in regional development and resource use often creates conflicts of interest in the use of space and resources as well as opportunities for environmental degradation and greater externality problems due to limited management of resources.

Thus, in order to reduce the friction that exists, it is important to provide welfare to the maritime community in their daily lives and activities. This was carried out as an effort to develop and conserve resources in the waters, specifically the existence of the leading islands inhabited by maritime communities. The development of the frontier region is greatly helped by the attitude of the maritime community living in the border region with other countries to maintain the territorial integrity of the NKRI. With the





optimization and empowerment of maritime communities, the support of defense and state security can be guaranteed which is marked by activities by the Indonesian maritime community as a manifestation of the universal defense.

c. State Defense and Maritime Community Empowerment

The spectrum of defending the country is very broad, this starts from the good relations of fellow citizens to jointly counteract the real threat of armed enemies. It is including the good behaviour and do the best for the nation and the State. In Indonesia, the state defense process has been formally regulated in the Law. Among them have been included in Pancasila and the 1945 Constitution, especially article 30. In the article, it is explained that defending the nation is the obligation of all the people of Indonesia without any exception.

By carrying out the duty of defending the nation, this is a proof and process for all citizens to show their willingness to serve the country and the nation, including important elements of defending the country, such as the love of the country, awareness of nation and state, belief in Pancasila as an ideology country, willing to sacrifice for the nation and state and have the initial ability to defend the country. (Gantina, C., 2017).

The sea itself is an arena in the search for life for the maritime community. Initially the community aimed to seek life and sustain life, but in the end, they also aimed to develop prosperity, or in other words to build the glory and wealth of maritime activities in order to achieve national goals. The sea becomes a unifying media of the nation because through the sea many people from various nationalities interact with various

activities. Through the sea people from various nationalities carry out economic activities through "services" on intercontinental or inter-island shipping. Of course, things related to the progress of the maritime world are worth empowering.

In the maritime community, including in Indonesia, a number of new maritime economic sectors and sub-sectors have emerged that bring up social segments or categories such as miners, industrial workers, tourism managers and employees, marines, academics / researchers, bureaucrats, etc. The growth of economic sectors and services with the maritime community segments requires and is followed by developments and institutional changes into its organizations and regulation. Another tangible form of empowerment is by authorizing fishing boats in the context of business development supported by

capable marine fisheries technology accompanied by building the maritime community's own human resources. This certainly will have a positive impact on the maritime community in exploring existing marine resources and reducing the risk of conflict between fishermen and weak economic levels. Empowerment itself means creating opportunities for the maritime community to determine their needs, plan and carry out their activities, which finally creating permanent independence in the life of the community itself. (Jamil, M., 2015).

Thus, the spirit of national defense which is integrated with the form of maritime community empowerment at every level of society will guarantee the integrity of the Indonesian nation and state in order to maintain the upright position of the Republic of Indonesia

and the existence of Indonesia on the international scene.

### Conclusion

In conclusion, the enthusiasm and awareness that Indonesia is a Maritime Nation also needs to be continuously implemented in government policies and real activities of all citizens. It is quite unfortunate if at the level of implementation in the field and at the level of most communities, there is still a lack of public awareness as a Maritime Nation. The support of the state defense concept can be interpreted in a non-physical way, it can be defined as all efforts to defend the country by increasing nationalism, namely the awareness of nation and state, embedding love for the homeland, and playing an active role in advancing the nation and state in realizing "Indonesia as the Maritime Axis World". In order to

comprehend the universal defense, human resources become a central point that needs to be fostered and developed as a potential nation that is capable of carrying out the development and overcoming all forms of threats, challenges, obstacles and disturbances (ATHG) originating from within and outside the country. Thus, like a universal defense, maritime society must also be apprehended in all Indonesian people because the Indonesian nation is a worldwide maritime nation.\*\*\*



# BUILDING SUPPORTING COMPONENTS THROUGH THE SYNERGY OF STAKEHOLDERS

By:

Tri Rahayu Irianingsih, SH.MH

National Defense Analyst, Directorate of Supporting Component Ministry of Defence

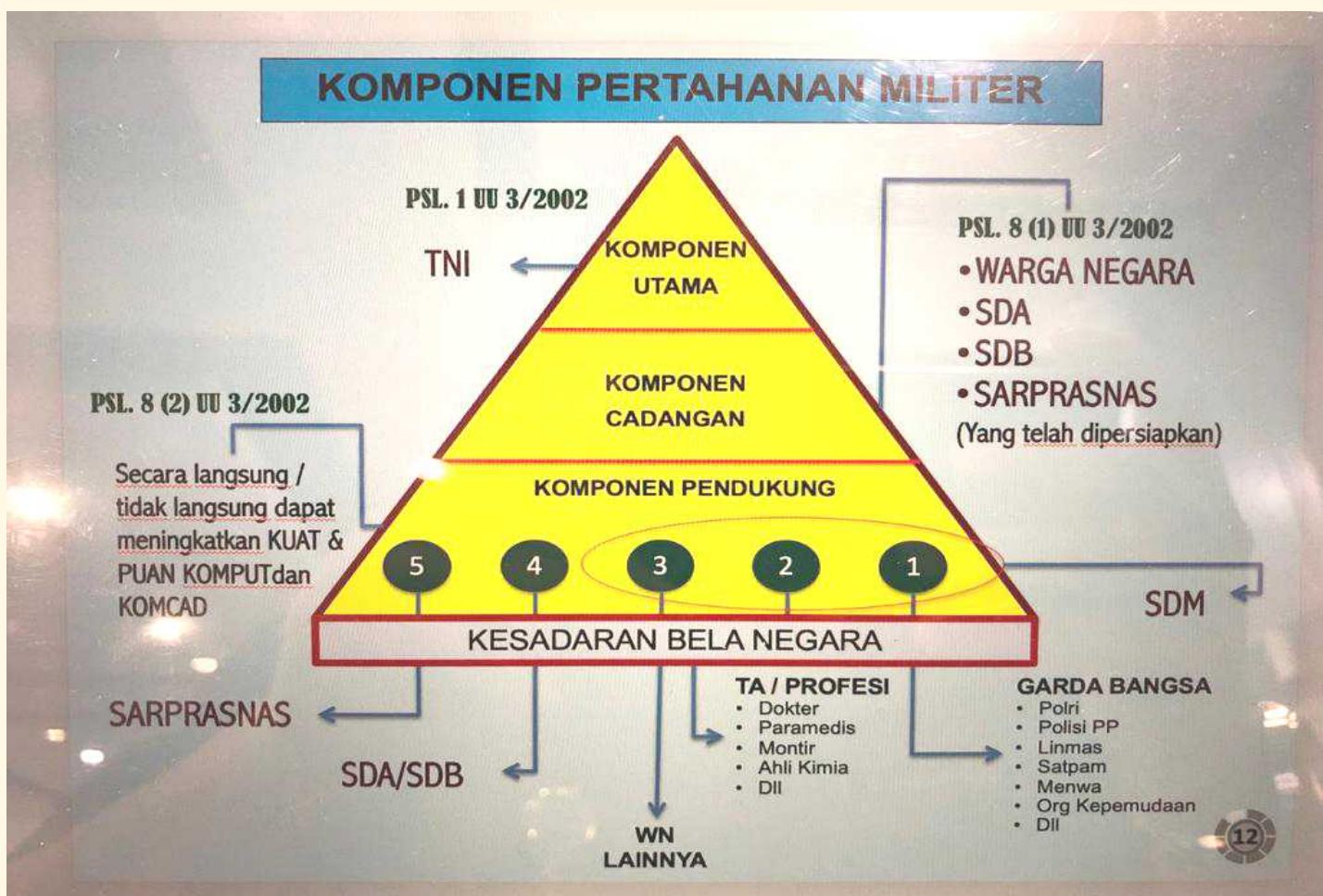
## Introduction

The supporting components according to the Law Number 3 of 2002 concerning National Defense are National Resources that can be used to increase the strength and capability of the Main Components and Reserve Components. National Resources consist of human resources, natural resources, artificial resources and infrastructure.

The involvement of national resources in a universal defense system has the meaning of involving all citizens, regions, other national resources, and being prepared early by the government and carried out in a total, integrated, directed and continuing manner to uphold national sovereignty, territorial integrity and the safety of all nations from all threats, one of them is by building Supporting Components for the national defense forces.

The main problem in building supporting components is the absence of a legal umbrella in the form of a law on supporting components. The purpose of this paper will be more focused on how to synergize stakeholders to build Supporting Components in accordance with Law Number 3 of 2002 because since it was enacted until now 16 years have passed; the law on supporting components cannot be realized.





If this is related to Presidential Regulation Number 41 of 2010 concerning General Policy on National Defense, there is still a gap for us to pioneer the development of supporting components. One of the provisions in the Presidential Regulation states that it is possible for the Ministry of Defense and related agencies to enter into ad hoc cross-sectorial cooperation in order to bridge various interests while awaiting relevant legislation.

Then the transformation of national resources for the benefit of national defense, which is within and or outside the management of ministries in charge of defense, must be utilized to the maximum extent possible to build the strength of the national defense component,

includes supporting components.

On the basis of these policies, the national resources that will be built as a supporting component, the Minister of Defense needs to synergize, integrate and direct stakeholders/stakeholders related resources so that the development of supporting components can be realized according to the policy direction and national defense strategic objectives.

### Analisis

Ministries/Institutions, the private sector and regional governments as stakeholders, who jointly develop Supporting Components, carry out national

resources that are within and/or outside the management of the Ministry of Defense. Supporting components are national resources that can be used to increase the strength and capability of the main components and reserve components, which consist of:

1. Human resources based on the 2013 National Development Planning Agency (Bappenas) projections that population of Indonesia in 2018 it reached 265 million. The number consisted of 133.17 million male and 131.88 million female souls.
2. Natural resources consisting of:

- a. Renewable resources, such as: forests, land, water, animals, plantation products, fishery products and so on.
- b. Non-renewable resources, such as: mining goods (petroleum, coal, natural gas, mineral and non-mineral mining goods).
3. Artificial resources are the result of development from natural resources to improve the quality, quantity, and/or capability of its carrying capacity, including artificial forests, reservoirs and superior species, which in their utilization and management can support the level of regional development while maintaining the balance of the ecosystem in the

region. The target of utilizing the potential of artificial resources is used for the Food Industry, Energy Industry, Water Industry, Drug Industry, Raw Material Industry, Main Weapon System Industry and Infrastructure Development.

4. National facilities and infrastructure are the result of human cultivation that can be used as a supporting tool for the interests of national defense in order to support national interests, such as: cars, motorcycles, trains, ships, airplanes, airports, stations, terminals, roads, bridges, docks/shipyard and so on.

National resources for supporting components are prepared by the government early

and carried out in a total, integrated, directed and continuing manner to uphold national sovereignty, territorial integrity and safety of all nations from all forms of threats and disturbances. This is done so that it can be used in peacetime for the benefit of welfare and during the war for the sake of defense. The scope of the arrangement and guidance activities are as follows.:

First, the process of structuring and stipulating the Supporting Components includes the activities of preparing and defining national resources which consist of data collection, sorting, selection, verification and certification of all existing national resources.

In connection with the structuring process, ministries/institutions, the private sector and the regional government as stakeholders have





the role to provide data on the national resources of their national resources. The national resources consist of human resources, natural resources, artificial resources and national infrastructure both according to their nature (qualitative or quantitative), the source (internal or external), how to obtain it (primary or secondary) or according to the time of collection (cross section or periodically) to the Ministry of Defense or TNI Commander. The data collection will be useful as the main basis for presenting the accuracy and relevance of data, to avoid inconsistencies in the data in the field, and to compile a standard format.

Therefore all data obtained from ministries/institutions, the private sector and local governments as stakeholders, will be able to support the establishment of supporting

components in order to support the operations of land-based combat, maritime and air forces during wartime. Therefore, there needs to be a strong commitment between the relevant Ministries/ Institutions, the private sector and the Regional Government in the form of a Joint Agreement (KB) or Cooperation Agreement (PKS) for the determination of national resources in the interests of national defense.

Management of national resources as mentioned above, are grouped according to the needs of the Main Components and Reserve Components into segments of the Supporting Components arranged according to competencies, products / services and their characteristics, which consist of: 1) Human Resources (Peace, esprit de corps, intellectuality, professionalism

and nationalism spirit) are organized into segments of the National Guard, Experts / Professionals and other Citizens; 2) for Natural Resources and Artificial Resources arranged as Regional Logistics and Strategic Material Reserves; and 3) National Facilities and Infrastructures arranged to support the interests of the National Industry defense.

Furthermore, after the structuring process has been completed, national resources will be established to become a supporting component through:

a. Verification, which confirms the capabilities and competencies as well as the capacity of segments with techniques that can ensure the location/address. Institutionalization must be carried out in verification as a forum,

namely the establishment of a coordinating institution that can bring together elements of the defense function in charge of supporting components with verified segment managers.

- b. Characterization, namely the activity of internalizing the roles and functions of the Supporting Component segments that the selection carried out is in accordance with the criteria and forms of support needed for the Main Components and Reserve Components. Acting activities are carried out through socialization, postal rehearsals and simulations.
- c. Certification, namely the end of administrative determination activities that ratify the roles and functions

of the Supporting Component segments. In certification, the competencies, capabilities, capacities and roles of both the Supporting Component segments are local and national in supporting the Main Components and Reserve Components.

Second, Coaching of Supporting Components is a series of activities related to planning, organizing, implementing, monitoring and controlling the development process of the Supporting Component in an efficient and effective manner. There are 2 aspects of supporting the Supporting Components, namely:

- a. Professional Aspects.

Fostering aspects of professional functions carried out by Ministries/Agencies and





Agencies in the regions and professional institutions that shelter them according to the needs of their organizations. Coaching is carried out through basic training and ongoing training in the field of his profession.

#### b. Role Aspects

In line with the professional aspect, that each segment is supervised by its role as a supporting component at the time of mobilization in accordance with its certification. Supervision is done directly and indirectly.

First, directly is by involving elements and functions of defense. Examples: 1) If the ability accelerates,

the segment is expert /professional; 2) if the production /service accreditation is the national industry segment; 3) Civic order simulations and disasters if supervised by the National Guard; 4) production and support capabilities if supervised by SDAB/National Health Insurance, and 5) alertness if the segments are citizens of other countries.

Secondly, indirectly by providing technical instructions carried out by Ministries / Agencies and Services / Agencies in the regions and professional institutions that shelter them in the form of Socialization, Facilitation, Technical Guidance, Post Command Rehearsal and Field Rehearsal. For Technical Guidance carried out through Training Of Trainers (TOT).

Based on general policies regarding the implementation of national defense, the Minister of Defense collaborates with the heads of ministries and other government agencies to develop and implement strategic planning of national resource management for defense purposes.

The use of Supporting Components during the war in accordance with segmentation and the form of support to increase the strength and capability of the main components and reserve components, the national resources that have been prepared by the government in peacetime can be implemented in wartime. The act of mobilizing national resources for the use of supporting components is based on Law Number 27 of

1997 concerning Mobilization and Demobilization. Thus building a Supporting Component is important, as an integral part of the Universe Defense System.

### Conclusion

1. Building Support Components in accordance with Law Number 3 of 2002 needs to involve stakeholders to obtain accurate and relevant national resource data as a basis for formulating a standard format in order to support operational operations on land, sea and air dimensions during wartime. Therefore what needs to be done by the Ministry of Religion is to work together and cooperate with relevant stakeholders (ministries / agencies, private sector and local government).

2. It is necessary to build a strong commitment with relevant Ministries/Agencies, the private

sector and the Regional Government that are embodied in more binding arrangements, namely the Joint Agreement (KB) or Cooperation Agreement (PKS) as the basis for the building of supporting components jointly in the case of data collection, sorting, selection, verification and certification of all national resources including activities related to planning, organizing, implementing, monitoring and controlling the process of building Supporting Components.

### Recommendation

To obtain data on the national resources of the supporting components, the Ministry of Defense needs to build strong cooperation with ministries/institutions, the private sector and regional governments as stakeholders through more binding arrangements namely Collective Agreements (KB) or Cooperation

Agreements (PKS) as a basis for building components supporters carried out together.\*\*\*

### Bibliography:

1. Majalah Internal Potensi Pertahanan edisi VI Maret 2014. XX hal. 79
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.



# ANALYSIS OF THE NEEDS OF THE TNI HOSPITAL SHIP IN MILITARY OPERATION OTHER THAN WAR OF RESPONDING TO NATURAL DISASTERS

By:

Lieutenant Colonel Kav. Darwin Saputra, S.I.P., M.Han.

Head of Subdivision of Evaluation Defence Infrastructure Agency Ministry of Defense

## Background

**I**ndonesia is a country which is rich in natural resources and it is also known as the emerald equator. However, behind the abundant of the natural resources, Indonesia is a country that is prone to disasters. Located on 3 active tectonic plates, called Eurasia, Indo-Australia and Pacific as well as its hydrometeorological conditions, Indonesia often experiences earthquakes, floods, landslides,

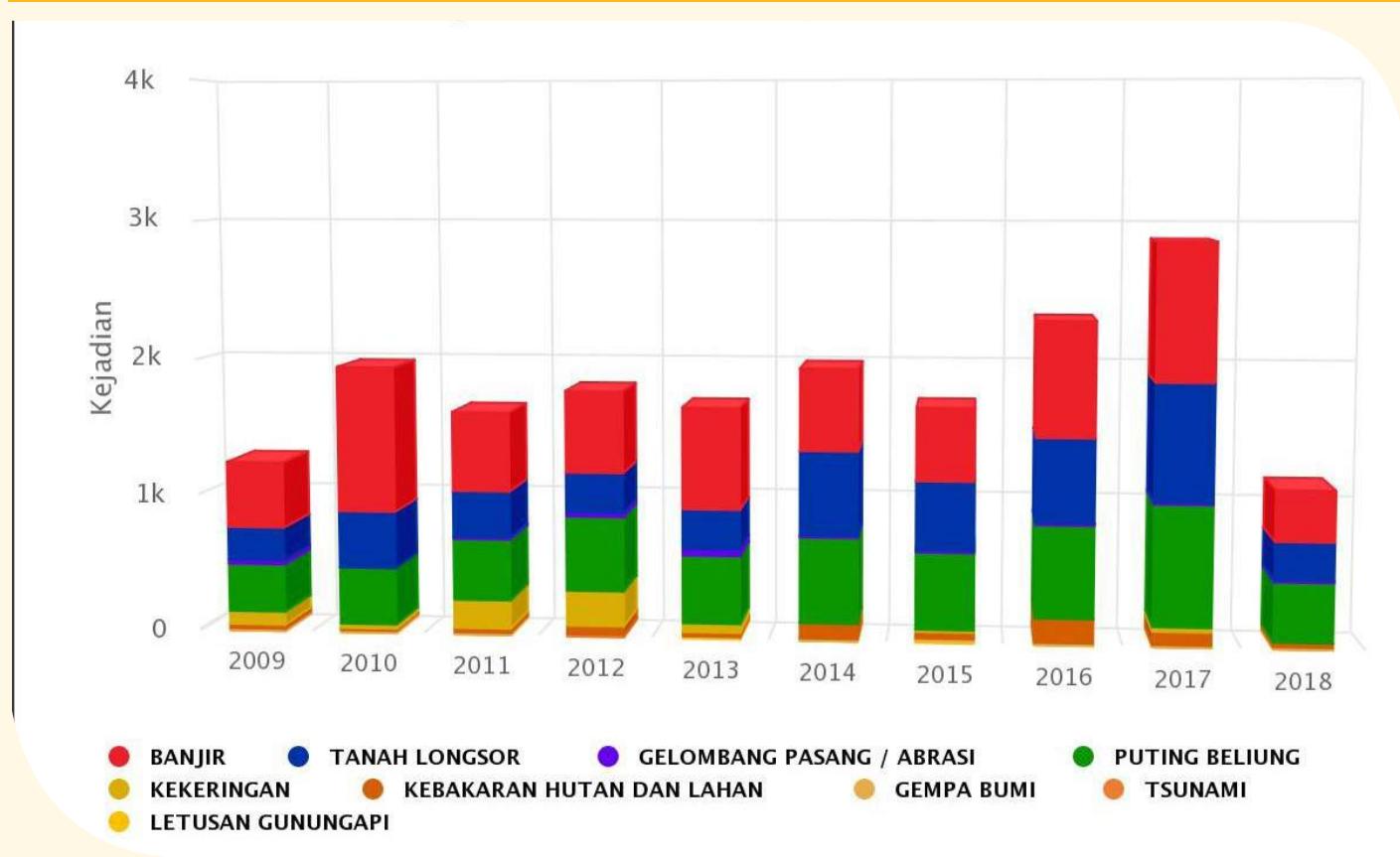
droughts, tornadoes, and even tsunamis (Maarif, 2012).

In addition, Indonesia is also located in the middle of the Pacific Ring of Fire area. Pacific Ring of Fire or Circum-Pacific belt is often referred as the cause of why Indonesia often experiencing earthquakes as well as having many volcanoes. This makes various types of natural disasters as a real threat to the Indonesian people. Data on the incidence of various natural

disasters from 1999-2008 shows that 95% of those who lost their lives were caused by earthquakes and tsunamis (Ma'arif, 2012).

In Figure 1.1 it can be seen that most of the disasters that have occurred were caused by hydrometeorological disasters. This condition implies that the physical threat that is actually faced by the Indonesian people is not a war, but a natural disaster which if it is not anticipated early, it will cause

Figure 1.1



(source: BNPB.go.id, 2018)

many casualties. The history of disasters shows that there has been an increase from time to time, that Indonesia is considered as a disaster supermarket and now is turning into a disaster laboratory where many countries learn how to cope with it (Ma'arif, 2012).

Geographically Indonesia stretches from 6° LU to 11° LS and 92° to 142° BT, consisting of large and small islands which total number is approximately 17,504 islands. Three-quarters of the area is sea (5.9 million km<sup>2</sup>), with a coastline length of 95,161 km, the second longest after Canada (Lasubuda, 2013). As an archipelagic country, Indonesia has been internationally recognized (UNCLOS 1982) which was later ratified by Indonesia under Law No. 17 of 1985. Based on UNCLOS 1982, the total area of Indonesia's sea area is 5.9 million km<sup>2</sup>, consisting of 3.2 million km<sup>2</sup> of territorial waters and 2.7 km<sup>2</sup> of

waters in the Exclusive Economic Zone, this area does not include the continental shelf. This makes Indonesia as the largest archipelagic country in the world (Lasubuda, 2013).

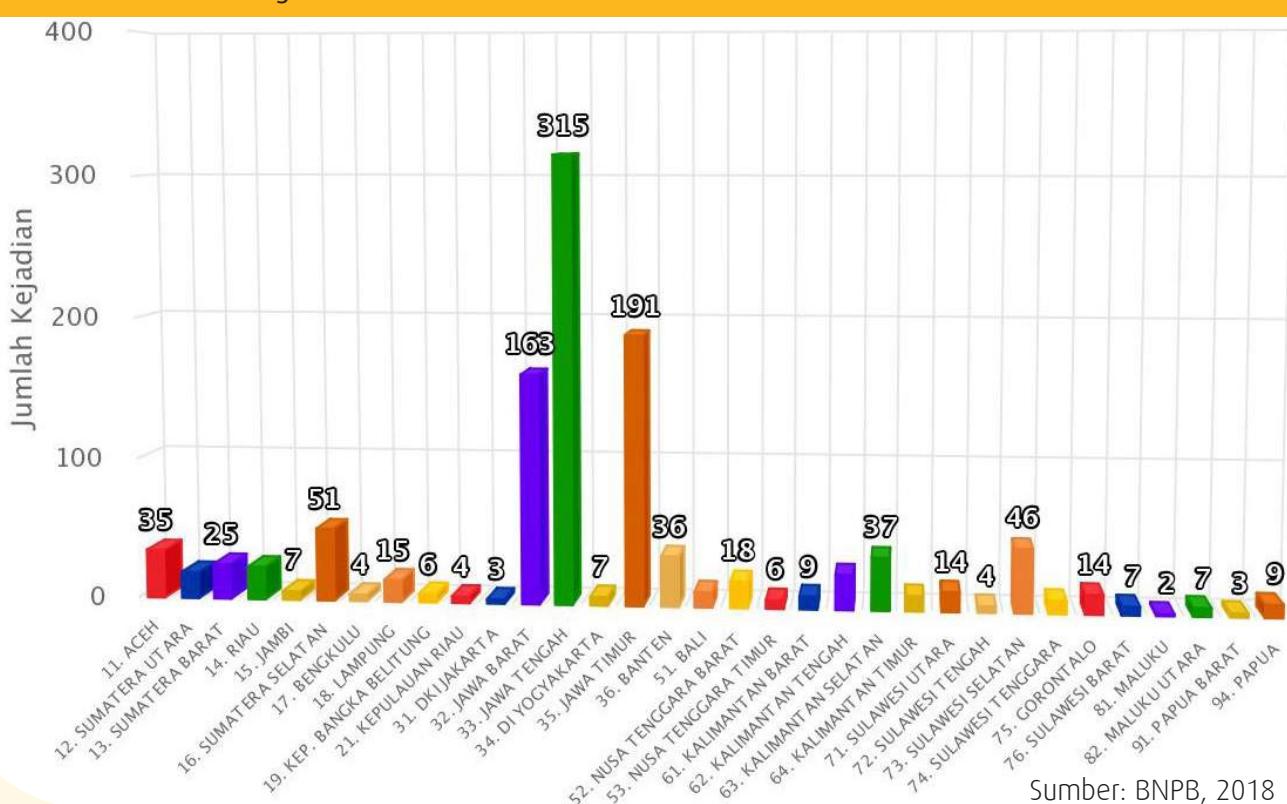
The geographic structure of the territory of Indonesia in the form of islands when juxtaposed with the threat of disaster that lurks Indonesia, makes a new problem, specifically the difficulty of access to disaster locations which not only occur in large islands, but is very likely to occur in small islands in Indonesia that is far from the city centre.

In Figure 2.2, it can be seen that the occurrence of disasters in Indonesia does not only occur in large islands such as Java, but the disasters also threaten small islands as well as the islands that far from the city centre. These islands will then be difficult to mobilize,

be it resource mobilization or mobilization of assistance in the event of a disaster.

Indonesia is the second largest archipelagic country in the world consisting of 17,499 islands with a sea area of ± 5.8 million km<sup>2</sup> and a coastline length of ± 81,000 km (Rianto et al., 2017) As an archipelagic country, Indonesia must do many things to provide various public services especially the medical services which considered as the primary needs. In accordance with Article 28 H of the 1945 Constitution and Law No. 36 of 2009 concerning Health mandates that every Indonesian citizen has the right to obtain safe, quality and affordable health services. Hospital use is still limited in the urban areas. The obstacle faced by remote areas is the lack of medical personnel and geographical constraints (Rizaldi et al., 2015).

Figure 2.2 Numbers of Disasters Based on Indonesian Province



The results of the 2010 census of the Indonesian population were 237,641,326 million (BPS, 2015). Residents residing outside Java, especially in the small islands of Indonesia, are still in desperate need of assistance, especially the health assistance. This condition will get worse with the threat of disasters in Indonesia. The need for health facilities in remote areas, especially during disasters, will be even greater.

One component that is directly involved in providing assistance to victims of natural disasters is the Indonesian National Army (TNI). This is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004 regarding to the TNI. The Law states that one of the tasks of the *TNI* in Military Operations Other Than War (OMPS) is helping to overcome the consequences of the natural disasters, displacement, and the provision of humanitarian assistance.

Based on this, of course, the completeness of *TNI* defence equipment in disaster OMPS is needed to support the response due to disasters and the provision of humanitarian assistance. Seeing the threat of existing disasters and the geographical structure of the Indonesian state which consists of islands, the need for hospital ships is very necessary in the OMPS. At present, the *TNI* only has one Hospital Ship, the Hospital dr. Soeharso (SHS) -990. The number of this ship is less considering Indonesia's geographical structure which is an archipelago. Therefore, the author will discuss the analysis of the needs of the *TNI* Hospital ships in military operations in addition to overcome the natural

disasters, displacement, and providing humanitarian assistance.

## Discussion

Natural disaster events certainly cause many casualties, both fatalities and injured victims. The handling of injured victims, both minor injuries and serious injuries, is an important factor in reducing the number of casualties when a disaster occurs, so that it can be said that the role of the hospital is very large. In conditions of emergency disasters, the availability of hospitals that can be accessed by victims is indispensable. Availability of health services access in the emergency conditions is one of the efforts to actualize the national security (Anwar, 2016).

The existence of a mobile hospital is very essential in the event of an emergency. Mobile hospitals can be in the form of field hospitals, hospital ships, or hospital aircraft owned by the health elements of the Indonesian National Army (military organization). This mobile hospital is very effective because the location can be adjusted to the needs of care at that time. Mobile hospitals are also very effective in supporting health missions to help victims of the natural disasters (Anwar, 2016).

Confronted with the threat of high disaster in Indonesia, of course a good prevention and mitigation is needed to minimize the number of fatalities. One of the preventions and mitigation efforts is the availability of good facilities and infrastructure in the efforts to handle victims of disasters and conflicts. Hospital Ship is one of the important supporting infrastructures in minimizing the

number of victims. Besides being able to become a health service centre, hospital ships can also be used to mobilize human resources that can help victims of natural disasters and also health workers needed to provide medical services to victims.

Indonesia has one unit of the hospital ship namely *KRI Dr. Soeharso*. Joining the Navy fleet in 2003, *KRI Dr. Soeharso* was the only hospital ship in the country. With a 122-meter length, *KRI Dr. Soeharso* is a landing craft platform. In an emergency situation the ship can accommodate 400 soldiers and 3,000 passengers.

*KRI Dr. Soeharso* as a hospital ship has a strategic role and can be the main choice in health services in coastal areas and small islands, including in disaster management. Various health service operations and disaster services have been carried out by *KRI Dr. Soeharso* and proven hospital ships were needed in Indonesia. The following is the operation of the *KRI Dr. Soeharso*.

*KRI Dr. Soeharso* was inaugurated as a Hospital Help Boat on September 17, 2008 (previously a *KRI Tanjung Dalapele* Personnel Transport Assistance Ship). In addition to the activities in tabel 1, before being used as an auxiliary vessel for the hospital, *KRI dr. Soeharso* has carried out various health and disaster service operations such as health social service operations every year (*surya Bhaskara Jaya* and *Integrated Social Service TNI*) on the leading islands and remote islands, 2004 tsunami disaster relief operations and the West Sumatra earthquake relief operation in 2009.

KRI dr. Soeharso Operational Activity  
Year 2014 to 2015

<b>Year</b>	<b>No.</b>	<b>Type of Operation</b>	<b>Time</b>
2014	1.	Mentawai Megathrust <u>Direx</u> Ops. (Health Service)	15 days
	2.	Multilateral Ops.	18 days
	3.	SBJ LXIII/ Sail Raja Ampat Ops (Health Service)	28 days
	4.	Social Aid <u>Baweam</u> Ops (Health Service)	3 days
	5.	Sailing Pass Demo The handover of Commander's office	3 days
2015	1.	<u>Perisai Samor</u> Ops	30 days
	2.	<u>Baksos Banten dan</u> SAR L. Jakarta Ops.	13 days
	3.	<u>Komando</u> Jaya & Jayapura Ops. (Health Service)	45 days
	4.	SBJ/XIV & Sail <u>Tomini</u> Ops	36 days
	5.	TNI Anniversary Ops	10 days
	6.	<u>Latek Pelavaran</u> Ops	6 days
	7.	Smog Evacuation <u>Kalses</u> Ops. (Disaster Mgt)	15 days

(Source: Rianto dkk, 2017)

In 2018, many disasters occurred and there were fatalities and injuries so that adequate health services were needed for the victims of the disaster. This one of course must have been anticipated by the government considering the risk of high disaster is indeed threatening in various regions in Indonesia. One of the major disasters that occurred in August 2018, namely the 7 SR earthquake in Lombok caused 436 people to die. The distribution of death tolls is in North Lombok District 374 people, West Lombok

37 people, Mataram City 9 people, East Lombok 12 people, Central Lombok 2 people and Denpasar City 2 people. The injured were recorded at 1,353 people, of whom 783 were seriously injured and 570 were slightly injured. The most injured victims are in North Lombok as many as 640 people. North Lombok is the area most affected by the earthquake because it is close to the centre of the 7 SR earthquake. The distribution of refugees is in North Lombok Regency 137,182 people, West Lombok 118,818

people, East Lombok 78,368 people, and Mataram City 18,368 people (Nugroho, 2018).

KRI Dr. Soeharso was sent for a disaster management mission in Lombok shortly after the disaster with 65 doctors and nurses and pharmacists. In the body of his ship, there is still a semi-open hangar that can hold one medium helicopter. As a hospital ship, this warship has one emergency room, three surgical rooms, six polyclinic rooms, 14 clinical rooms and two inpatient

wards with a standard capacity of 40 beds (Marboen, 2018).

After the Lombok earthquake, in September 2018 an earthquake, tsunami and liquefaction took place in *Palu* and *Donggala*. The number of victims killed by the earthquake and tsunami in *Palu* and *Donggala*, Central Sulawesi (Central Sulawesi) per October 25, 2018 processed by BNPB, the death toll in the disaster reached 2,081 people.

KRI Dr. Soeharso was dispatched to this disaster management mission with a total of 93 personnel and additional 17 personnel of University of Hasanudin, 5 personnel of Airlangga University and other additions. From the departed team, all surgeons are complete.

Considering the function of the

RS Ship, especially in the rescue and disaster management missions, Indonesia should have increased the number of Hospital Ships. Disaster events always cause a large number of victims. The greater number of RS Boats is certainly very helpful in accelerating the handling of victims so that it reduces casualties. Moreover, looking at Indonesia's geographical conditions, RS vessels are very necessary to provide health services on remote islands which are the responsibility of the government.

There is no reference that states how many hospital ships a country needs. However, looking at Indonesia's geographical conditions, and the risks to disasters, more than one Hospital Ships is needed that can assist in the efforts of medical services and emergencies. Based on the narrative of the

TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto, ideally Indonesia has 10 Hospital Vessels (Hadi, 2018). This narrative reinforces that the increase in the number of hospital ships in *Indonesia* is very necessary given its very crucial function, which is related to the medical treatment and rescue of the victims.

### Conclusion

The increase number of KRI hospitals in Indonesia is very necessary given the disaster risks that exist in Indonesia and Indonesia's geographical structure consisting of islands causes more flexible and reachable health services in every region. KRI existence Dr. Soeharso in handling disasters and health services in Indonesia is needed to minimize the number of victims. The addition of the number of RS vessels for handling disasters





and medical services will be very significant in helping health services and handling victims. \*\*\*

#### Bibliography

Anwar, Syaiful. 2016. Melindungi Negara. Cetakan Pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta

Darwanto, Hery. Operasi Militer Selain Perang. Kementerian Pertahanan RI

Hadi, Syaiful. 2018. TNI: Idealnya Indonesia Punya 10 Kapal Bantu Rumah Sakit. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://nasional.tempo.co/read/1109849/tni-idealnya-indonesia-punya-10-kapal-bantu-rumah-sakit/full&view=ok>

Jakarta Greater. 2016. TNI AL Siap Beli 2 Kapal Rumah Sakit. Diakses pada 30 Agustus 2018 dari <https://jakartagreater.com/tni-al-siap-beli-2-kapal-rumah-sakit/>

Lasubuda, Ridwan. 2013. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif

Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax Volume 1-2 Januari 2013 ISSN: 2302-3589

Marboen, Ade P. 2018. Kapal Rumah Sakit KRI dr. Soeharso Siap Meluncur Ke Lombok. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.liputan6.com/health/read/3610524/kapal-rumah-sakit-kri-dr-soeharso-siap-meluncur-ke-lombok>

Nugroho, Sutopo Purwo. 2018. Dampak Gempa Lombok : 436 Orang Meninggal dan Kerugian Ekonomi Lebih Dari 5.04 Trilyun Rupiah. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://bnpb.go.id/dampak-gempa-lombok-436-orang>

Persada, Sailendra. 2012. TNI: Idealnya Indonesia Punya 10 Kapal Bantu Rumah Sakit. Diakses pada 30 Agustus 2018 di <https://nasional.tempo.co/read/1109849/tni-idealnya-indonesia-punya-10-kapal-bantu-rumah-sakit/full&view=ok>

Rianto, Fransiskus Sugeng. 2017. Implementasi Kapal Bantu Rumah Sakit

KRI dr. Soeharso 990 pada Operasi Militer Selain Perang (OMPS). Jurnal Prodi Strategi dan Kampanye Militer volume 3 Nomor 1 Tahun 2017

Rizaldy, Chairul; Chrismianto, Deddy; Amiruddin, Wilma. 2015. Studi Perancangan Kapal Rumah Sakit Tipe Katamaran untuk Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Wilayah Pesisir di Provinsi Papua Barat dan Papua. Jurnal Teknik Perkapalan - Vol. 3, No.4 Oktober 2015

Sulistyo, Muhamad. Implementasi Tugas Operasi Militer Selain Perang Kodam I/Bukit Barisan dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo. Universitas Medan Area

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

# THE MINISTRY OF DEFENSE REHABILITATION CENTER'S PARTICIPATION AT THE INDONESIA 2018 ASIAN PARA GAMES

By:

Erlin sudarwati, SKM.,MM

Head of Sub Division of Vocational Administration, Rehabilitation Centre,  
Ministry of Defence



Source: Writer

## Introduction

The Indonesia 2018 Asian Para Games (INAPG 2018) is the first special sports event for athletes with disability at the Asian level held in Indonesia. The Asian Paralympic Committee holds the Asian Para Games every four years followed by the disable athletes from all over Asia.

The Ministry of Defense Rehabilitation Center (Pusrehab Kemhan) is an agency that organizes integrated rehabilitation for persons with disabilities of the Ministry of Defense and the TNI. One of the activities is sports guidance, which is directed at increasing sports talents possessed by Kemhan and TNI personnel with disabilities in order to excel.

With the Asian Para Games held in Indonesia, The Ministry of Defense Rehabilitation Center participated in supporting the activity of sending athletes with disabilities of Kemhan and TNI personnel as well as personnel who were members of the committee and means of transportation used to support the activities of Asian Para Games athletes , and as supporters

in providing motivation for athletes who were competing.

### Asian Para Games 2018

Indonesia 2018 Asian Para Games was held on October 6-13, 2018 in Jakarta, precisely at the Bung Karno Stadium, Jakarta International Velodrome and JIExpo. The opening ceremony was held at Bung Karno Main Stadium on October 6, 2018, while the closing ceremony was held at Bung Karno Main Stadium at 13th of October 2018 . Indonesia is the third host. The Asian Para Games were first held in Guangzhou, China, in 2010, while the second Asian Para Games took place in Incheon, South Korea in 2014.

In order to succeed the 2018 Asian Para Games activities, the Indonesian Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC)

was formed with the tasks of preparing, implementing and evaluating the implementation of INAPG 2018. In addition, INAPGOC also wants to actively promote sports for persons with disabilities so that in the future support for enthusiasm for sports for persons with disabilities will continue to increase. Furthermore, this activity is expected to be the first step to make the opportunity to exercise a right for all levels of society.

At this Asian Para Games event, there were 18 sports, which were contested with 512 match numbers. The numbers per sport were because the Games have different numbers to classify athletes according to their physical background. The sports branches that are contested are wheelchair fencing, wheelchair basketball, cycling, bocce, badminton, chess, goal ball, judo, bowling, archery,

athletics, powerlifting (weightlifting), swimming, shooting, wheelchair tennis, table tennis, tenpin bowling , and sitting volleyball. The number of countries participating in Indonesia in 2018 The Asian Para Games was 43 countries with as many athletes 2762 athletes with disabilities.

The Indonesian 2018 Asian Para Games motto is "The Inspiring Spirit and Energy of Asia" (Spirit of Inspiration and Asian Energy). Through this activity, it is expected that the success and actions of athletes with disabilities can be a source of inspiration and motivation for other individuals throughout Indonesia.

The Ministry of Defense Rehabilitation Center (Pusrehab Kemhan) Participation

The Ministry of Defense Rehabilitation Center (Pusrehab



Kemhan) as an institution that organizes Integrated Rehabilitation for persons with disabilities of the Ministry of Defense and the TNI, one of its activities is sports guidance to improve sports talents possessed by persons with disabilities Kemhan

Ministry of Defense and other TNI.

The athletes with disabilities of the Ministry of Defense and TNI personnel who participated in the 2018 Indonesian Asian Games include:

The Ministry of Defense Rehabilitation Center (*Pusrehab Kemhan*) official vehicle which supports the 2018 Asian Para Games Indonesia activities , as a means of transportation in a series of activities including 1 unit

NO	ATLET NAME RANKS/ SERVICE NUMBERS	KINDS OF DISABILITY	SPORTS
1.	Puji Sumartono Kopda / 31970071680277	Amputation over the Right Knee	Wheelchair Tennis
2.	Maryanta Penda Tk.I III / b 196603131996031001	Weaknesses motion of the Left Body	Wheelchair Tennis
3.	Aris Hariyadi Pelda / 3930191531172	Amputation Under the Right Knee	Shooting
4.	Dwi Retno Sulanjari Pelda / 514609	Right leg weakness	Shooting
5.	Jeni Susilo Serda / 542039	Amputation of the Left Knee	Shooting

and TNI personnel to be able to achieve. With the existence of the Indonesia 2018 Asian Para Games, it is an opportunity for athletes with disabilities of the Ministry of Defense and the TNI from the results of the Ministry of Defense Rehabilitation Center (*Pusrehab Kemhan*) guidance to participate in this special sports event for athletes with disabilities at the Asian level. Even though they have not won a championship medal, at least they have been fighting to carry the name of Indonesia and also as a motivation to be more active in training and to be an inspiration for persons with disabilities of the

On the other hands, the Ministry of Defense Rehabilitation Center (*Pusrehab Kemhan*) personnels who support the Indonesia 2018 Asian Para Games activities, as the executive committee including the Indonesian Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC) such as: Colonel Kes. Wahyu Dwi Santosa, MM, as a Member of the Classification Division of Deputy 1 Games Operation , Lieutenant Colonel Ckm (K) Dr. Endang Ernandini, Sp.RM., MARS and Penata T.I III / d dr. Rifqi Averrouza Hasbiandra as Classification Observer Sport Tenpin Bowling .

of Disability Special Bus Vehicles (Mitsubishi / FE84BC Bus No. Reg 7406-00) along with manning personnel namely Peltu Lis Wahab Syahroni and Pengda Tk.I II / b Seplili, as well as 1 unit of Special Disability Elf Vehicles (Isuzu NKR 55 C / O E2 L WB No Reg 7405-00) along with personnel who guarded namely Kopka Fahroji and Civilian Guntoro.

The participation of the Ministry of Health and Human Rights Center was also manifested in the attendance of the Opening Ceremony of the 2018 Asian Para Games Opening Ceremony on



Source: Writer

October 6, 2018 by Head of The Ministry of Defense Rehabilitation Center (*Kapusrehab*) and echelon 3 officials of the Ministry of Defense and TNI, as well as persons with Kemhan Personnel and TNI participating in the Ministry of Defense. In addition to attending the Opening Ceremony, persons with disabilities of the Ministry of Defense and TNI Integrated Rehabilitation participants along with the Ministry of Defense staff also had the opportunity to watch the sports competition followed by the Ministry of Defense Rehabilitation Center (*Pusrehab Kemhan*) athletes by becoming supporters to provide motivation and enthusiasm to compete.

### Conclusion

With the existence of the Indonesia 2018 Asian Para Games it is hoped that it can be used as a motivation and enthusiasm for persons with disabilities of the Ministry of Defense and the TNI, although with conditions that are no longer the same as TNI soldiers,

they still able to fight and excel the Indonesian state and nation in different ways, namely with sports achievements of persons with disabilities.

disabilities from the Ministry of Defense and TNI who are carrying out Integrated Rehabilitation at the Ministry of Defense Rehabilitation Center (*Pusrehab Kemhan*). \*\*\*

In accordance with the Indonesian 2018 Asian Para Games motto, "The Inspiring Spirit and Energy of Asia", it is hoped that the success and action of athletes with disabilities can be a source of inspiration and motivation for other individuals throughout Indonesia, especially persons with



